

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pembangunan Daerah adalah serangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
6. Rencana . . .

6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Tegal yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi Daerah pencapaian target pembangunan pangan dan gizi tahun 2025-2029.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG 2025-2029 merupakan pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-PG 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Kondisi Umum, Tantangan dan Hambatan
 - Bab III : Kebijakan Daerah
 - Bab IV : Rencana Aksi
 - Bab V : Kerangka Pelaksanaan dan Monitoring
 - Bab VI : Penutup
- (2) RAD-PG 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

RAD-PG 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Daerah dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG 2025-2029.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 Februari 2025
Pj. WALI KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 3 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

SARTONO EKO SAPUTRO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pangan dan Gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar dalam menghadapi persaingan global. Jumlah penduduk yang besar, modal badan fisik biologis, modal rohaniah dan mental, serta potensi efektif bangsa merupakan sebagian dari modal pembangunan. Membangun SDM seutuhnya berarti menjamin adanya peningkatan taraf hidup rakyat dari semua lapisan masyarakat dan golongan. Peningkatan taraf hidup rakyat tercermin pada kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Kemajuan usaha pemenuhan kebutuhan pokok akan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dilakukan antara lain melalui pembangunan pangan dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kemandirian.

Pembangunan bidang pangan dan gizi ini mutlak diperlukan, hal tersebut dikarenakan jika terjadi permasalahan terkait dengan gizi yang terjadi pada masa kini maka akan menimbulkan masalah pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, usaha-usaha peningkatan gizi terutama harus ditunjukkan pada anak-anak dan ibu hamil. Karena pada masa yang akan datang anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Penundaan pemberian perhatian pemeliharaan gizi yang tepat pada anak-anak akan menurunkan potensi sebagai SDM pembangunan masyarakat dan ekonomi nasional. Berbagai alasan mengapa anak-anak memerlukan penanganan serius terutama jaminan ketersediaan zat gizi, yaitu:

- a. Kekurangan Gizi adalah penyebab utama kematian bayi dan anak-anak. Hal ini berarti berkurangnya kuantitas SDM di masa yang akan datang.
- b. Kekurangan Gizi berakibat meningkatkan angka kesakitan dan menurunnya produktifitas kerja manusia. Hal ini berarti dapat menambah beban pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.
- c. Kekurangan Gizi berakibat menurunnya kecerdasan anak-anak. Hal ini berarti menurunnya kualitas kecerdasan SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa.

- d. Kurangnya Gizi berakibat menurunnya daya tahan manusia untuk bekerja, yang berarti menurunnya prestasi dan produktivitas kerja manusia (Budiyanto, 2002).

Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang berupa peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Salah satu strategi yang diambil pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Sejalan dengan hal tersebut, maka ketahanan Pangan dan Gizi menjadi salah satu keadaan yang akan diwujudkan dalam pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 – 2029 untuk mendukung upaya membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.

Ketahanan Pangan dan Gizi dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini diwujudkan melalui penyusunan instrumen kebijakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah diimplimentasikan secara nasional sejak Tahun 2001.

Dasar hukum kebijakan Pangan dan Gizi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima tahun. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi atau RAD-PG Kab/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan definisi tersebut, pengertian pangan yang diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang sangat luas. Pengertian pangan yang sedemikian luas akan sangat sulit mengukur kebutuhan pangan seseorang, namun demikian pemerintah menetapkan kebutuhan pangan seseorang diukur ketercukupan energi dan kalori yang berasal dari pangan yang dikonsumsi. Kebutuhan pangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 diatur oleh pemerintah berkaitan dengan ketersediaannya, keamanannya, distribusinya dan keanekaragamannya.

Selain ketercukupan, penyediaan bahan pangan juga harus berkualitas sesuai dengan persyaratan kebutuhan gizi perorangan. Gizi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Agar dapat hidup sehat manusia membutuhkan asupan gizi yang cukup dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Manusia yang kebutuhan pangannya kurang tercukupi, biasanya

asupan gizinya juga kurang. Di Indonesia banyak kasus kurang gizi bukan hanya disebabkan rendahnya pemahaman pola konsumsi yang sehat oleh masyarakat, melainkan adanya pola yang salah dalam mengelola kebijakan pangan dan pertanian.

Menyikapi beberapa kondisi tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Tegal perlu segera menyusun strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Selain itu, Rencana Aksi Pangan dan Gizi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 ayat (3) yang menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun”. Rencana aksi ini juga merupakan upaya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Dokumen ini diharapkan dapat mensinergikan seluruh komponen penunjang ketahanan pangan dan gizi di Kota Tegal sehingga pada akhirnya dapat dijadikan regulasi melalui Peraturan Wali Kota.

Sejalan dengan perkembangan saat ini, ketahanan pangan dan gizi hendaknya tidak hanya berorientasi pada sektor pangan dan pertanian yang berada di hulu serta kesehatan dan gizi di hilirnya, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas. Untuk itu, kementerian PPn / Bappenas bersama dengan kementerian / lembaga terkait dan di dampingi oleh pakar telah menyusun RAN-PG Tahun 2020-2024 sebagai acuan terkini bagi seluruh kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

RAN PG adalah dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target ketahanan pangan dan gizi nasional. RAN PG 2020-2024 berorientasi pada ketahanan Pangan dan Gizi hingga ke tingkat Rumah Tangga melalui penguatan di empat aspek ketahanan pangan dan gizi yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, kelembagaan sistem pangan dan gizi.

Selanjutnya provinsi dan kab/kota menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu ketahanan pangan dan gizi kedalam RAD-PG yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, sesuai kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing, serta mengedepankan aspek keterpaduan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Dengan RAD – PG diharapkan pemerintah daerah memiliki komitmen dan kejelasan perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan untuk mencapai sasaran ketahanan pangan dan gizi.

I.2 Kedudukan RAD dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong merupakan visi Presiden 2020-2024 yang salah satunya dicapai dengan misi pembangunan SDM dan infrastruktur terutama infrastruktur pelayanan dasar.. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/ /L) dan RPJMD. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahap akhir dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2020 – 2025.

Kota Tegal telah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

Dokumen tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2026. Terdapat beberapa kebijakan dalam dokumen RPD yang selaras dengan tujuan pembangunan pangan dan gizi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ada dalam dokumen RPD.

RPD 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan kebijakan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diampunya. Dalam penyusunannya, RPD memperhatikan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah pusat yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan juga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal sendiri telah selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang ada dalam dokumen RPD Kota Tegal Tahun 2025-2026. Dengan demikian, maka dokumen RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal ini dapat dijadikan acuan juga oleh seluruh perangkat daerah dalam menentukan kebijakan pangan dan gizi sesuai dengan kewenangan yang diampunya.

Terdapat 4 tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dalam RPD Kota Tegal, yaitu Peningkatan derajat ekonomi masyarakat, Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan memperhatikan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, dari 4 tujuan tersebut ada 2 tujuan yang memiliki kaitan erat dengan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pangan dan gizi. Dua (2) tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan nomor 1; peningkatan derajat ekonomi masyarakat.

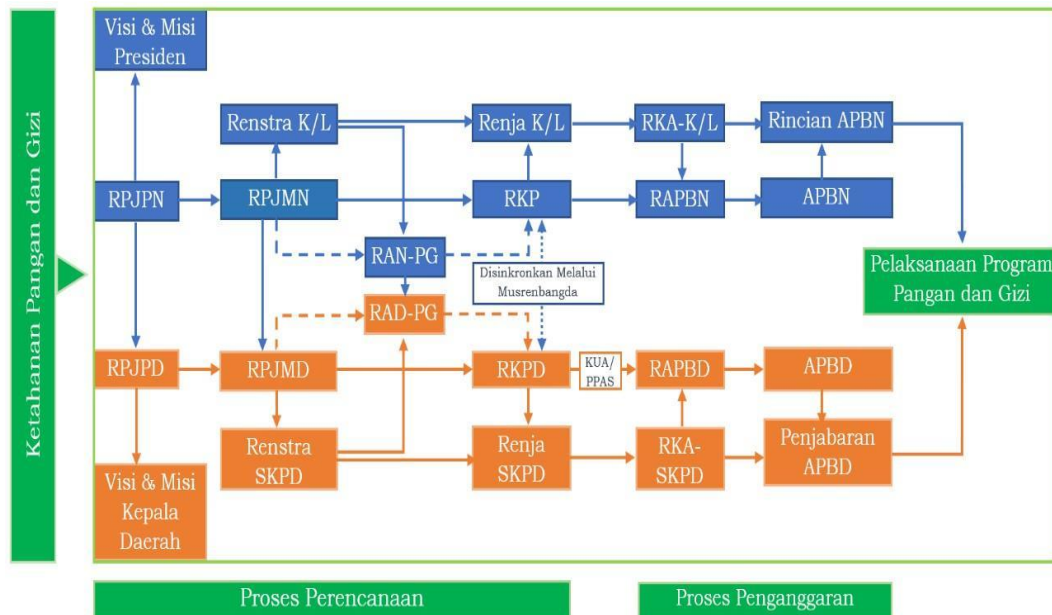
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pertumbuhan investasi, dengan indikator terkait pangan dan gizi adalah nilai investasi; dan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan dalam PDRB dengan indikator terkait pangan dan gizi adalah persentase kontribusi perdagangan dalam PDRB.

2. Tujuan nomor 2; Pengentasan kemiskinan.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketahanan pangan daerah, dengan indikator terkait pangan dan gizi adalah Indeks Ketahanan Pangan Daerah; yaitu ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu daerah.

Integrasi kebijakan RAD Pangan dan Gizi ke dalam kebijakan pembangunan Kota Tegal baik tingkat kota maupun tingkat perangkat daerah adalah sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber: Bappenas 2020

Dilihat dari gambar di atas, maka diketahui bahwa RAD Pangan dan Gizi merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD/RPD dan juga Renstra perangkat daerah, yang kemudian diturunkan ke dalam dokumen RKPD dan dokumen Renja perangkat daerah. Pencapaian pembangunan bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Posisi RAD-PG terhadap rencana pembangunan nasional dan juga daerah, dapat dilihat dalam Gambar I.2. gambar tersebut menunjukkan bahwa RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan RPJMD/RPD, serta agenda TPB/SDGs yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti: Percepatan Penurunan Stunting, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi gap program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2020-2024 dan RPJMD/RPD.

Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya

terkait dengan perbaikan kualitas SDM. Selain itu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

Gambar 1. 2 Posisi RAD-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024/RPD 2023-2026 dan TPB/SDGs



I.3 Tujuan Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Tegal dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi seluruh stakeholder untuk dapat mensinergikan rancangan program maupun kegiatan dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah. Selanjutnya penyusunan RAD-PG serta pemantauan dan evaluasinya diarahkan sejalan dengan aksi konvergensi penurunan stunting.

Adapun tujuan dari Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Tegal adalah:

- Memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan pangan dan gizi di Kota Tegal.
- Menentukan dan merumuskan strategi, arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan sebagai rencana aksi peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi; dan
- Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Pangan dan Gizi Kota Tegal.

I.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

BAB II

ANALISIS SITUASI

II.1 Capaian Kinerja Pangan dan Gizi Tahun 2023

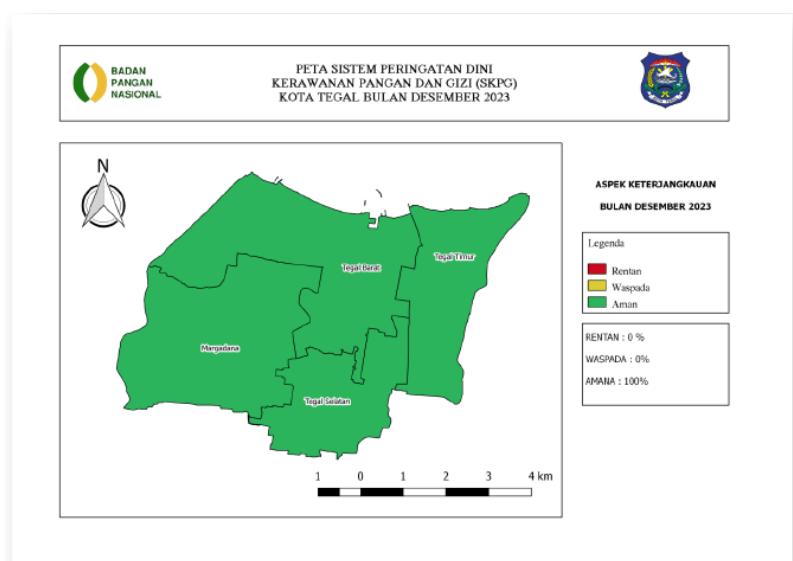
II.1.1 Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Sesuai Data dan Analisis SKPG Kota Tegal Desember 2023

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu *tools early warning system* sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Penyusunan SKPG bulanan Kota Tegal paling sedikit memuat aspek keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG bulan November, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 4 kecamatan (100%) dalam kategori waspada. Berdasarkan indeks keterjangkauan pangan terdapat 4 kecamatan (100%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 3 kecamatan (75%) dalam kategori rentan, yaitu kecamatan Tegal Barat, Tegal Selatan dan Margadana serta 1 kecamatan (25%) dalam kategori waspada yaitu Kecamatan Tegal Timur.

Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi data kejadian bencana dari BPBD. Data kejadian bencana menunjukkan bahwa terdapat 1 kecamatan (75%) yang tidak mengalami kejadian bencana. Selanjutnya, terdapat 1 kecamatan (25%) yang mengalami kejadian bencana kurang dari 10 kejadian. Jenis bencana yang terjadi yaitu kebakaran lahan sebanyak 1 kali di Kecamatan Tegal Timur. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi yang dijabarkan dalam laporan eksekutif ini.

Gambar 2. 1 Peta Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Kota Tegal Bulan Desember 2023



Rentan : 0%
Waspada : 0%
Aman : 100%
4 Kecamatan

Indeks Keterjangkauan menunjukkan status **aman**, namun tetap diperlukan upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga Pangan dengan memperhatikan data dukung informasi iklim dan kebencanaan.

Tabel 2. 2 Detail Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Aspek Keterjangkauan Bulan Desember 2023

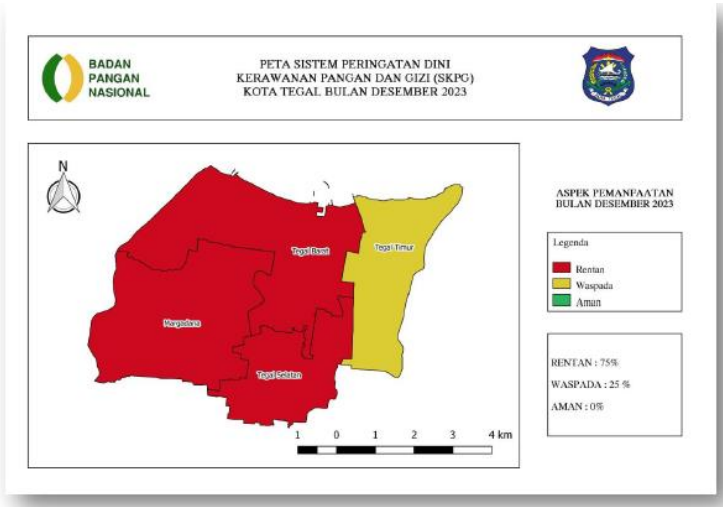
NO.	KOTA	KABUPATEN/ KOTA	HARGA BERAS 3 Bulan Sebelum				Bulan Berjalan				HARGA JAGUNG 3 Bulan Sebelum				Bulan Berjalan				HARGA GULA PASIR 3 Bulan Sebelum				Bulan Berjalan				HARGA MINYAK GORENG 3 Bulan Sebelum				Bulan Berjalan				HARGA DAGING AYAM 3 Bulan Sebelum				Bulan Berjalan				HARGA TELUR AYAM 3 Bulan Sebelum				Bulan Berjalan			
			Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23	Sep-23	Oktober-23	Nov-23	Des-23
1	Tegal	Tegal Barat	13000	13500	13750	13.500	7375	7310	7500	7.500	14245	15262	16386	16.921	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026
2	Tegal	Tegal Timur	13000	13500	13750	13.500	7375	7310	7500	7.500	14245	15262	16386	16.921	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026
3	Tegal	Tegal Selatan	13000	13500	13750	13.500	7375	7310	7500	7.500	14245	15262	16386	16.921	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026
4	Tegal	Margadana	13000	13500	13750	13.500	7375	7310	7500	7.500	14245	15262	16386	16.921	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026
KOTATegal			13000	13500	13750	13.500	7375	7310	7500	7.500	14245	15262	16386	16.921	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026	17000	17000	17000	17.000	39150	38000	37227	36.421	25875	25000	26023	26.026

NO.	KOTA	KABUPATEN/ KOTA	BERAS			JAGUNG			GULA PASIR			MINYAK GORENG			DAGING AYAM			TELUR AYAM			MURUT	
			Rata-rata 3 bulan	Value	Bobot	Rata-rata 3 bulan	Value	Bobot	Rata-rata 3 bulan	Value	Bobot	Rata-rata 3 bulan	Value	Bobot	Rata-rata 3 bulan	Value	Bobot	Rata-rata 3 bulan	Value	Bobot	VALUE	STATUS
1	Tegal	Tegal Barat	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	18	AMAN
2	Tegal	Tegal Timur	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	18	AMAN
3	Tegal	Tegal Selatan	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	18	AMAN
4	Tegal	Margadana	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	18	AMAN
KOTATegal			0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	18	AMAN

Tabel 2. 1 Rekomendasi Sesuai Hasil SKPG Per Pilar Aspek Keterjangkauan

STATUS AMAN	1. Tegal Barat	1. Indeks Keterjangkauan menunjukkan status aman , namun tetap diperlukan upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga Pangan dengan memperhatikan data dukung informasi iklim dan kebencanaan
	2. Tegal Timur	2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan
	3. Tegal Selatan	3. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar / gerakan pangan murah (GPM)
	4. Margadana	

Gambar 2. 2 Peta Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Kota Tegal Bulan Desember 2023



Rentan : 75 %
Waspada : 25 %
Aman : 0%

Tabel 2. 3 Detail Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Per Kecamatan Aspek Pemanfaatan Bulan Desember 2023

NO.	KOTA	KABUPATEN/KOTA	BB Sangat Kurang	BB Kurang	BB Normal	Risiko BB Lebih	BB Sangat Kurang + BB	TOTAL BB/U	HASIL		
									VALUE	BOBOT	STATUS
1	Tegal	Tegal Barat	72	330	1815	124	402	2.341	17,2	1	RENTAN
2	Tegal	Tegal Timur	48	406	2414	159	454	3.027	15,0	2	WASPADA
3	Tegal	Tegal Selatan	49	347	1820	80	396	2.296	17,2	1	RENTAN
4	Tegal	Margadana	54	276	1340	67	330	1.737	19,0	1	RENTAN
KOTATegal			223	1359	7389	430	1582	9401	16,8	1	RENTAN

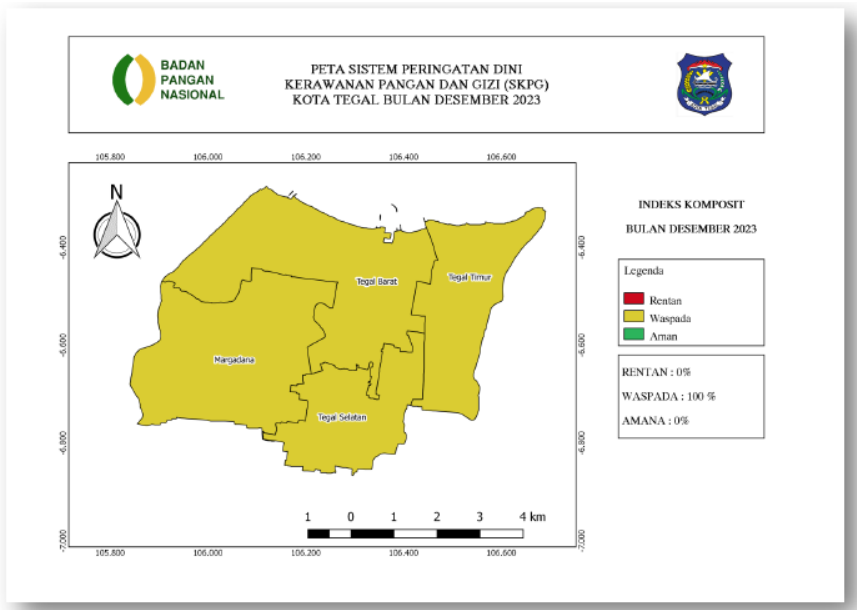
Tabel 2. 4 Rekomendasi Sesuai Hasil SKPG Per Pilar

STATUS RENTAN	1. Tegal Barat 2. Tegal Selatan 3. Margadana	1. Aspek pemanfaatan pada kecamatan Tegal Barat, Tegal Selatan dan Margadana termasuk dalam kondisi “rentan” karena presentase jumlah balitaunderweight terhadap jumlah seluruh balita >15%. 2. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa : • Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan dan melakukan langkah kongkrit yang diperlukan untuk Balita yang BB kurang atau BB sangat kurang dan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang anaknya mengalami <i>underweight</i>
STATUS WASPADA	1. Tegal Timur	1. Aspek pemanfaatan pada Kecamatan Tegal Timur termasuk dalam kondisi “waspada” karena presentase jumlah balitaunderweight terhadap jumlah seluruh balita diantara 10% - 15% 2. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa : • Melakukan upaya antisipatif memburuknya status gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kecamatan dengan kategori waspada. • Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan pangan dengan OPD Kesehatan,Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK, dan swasta. • Meningkatkan cakupan penimbangan balita di posyandu

NO	KOTA	Kab/Kota	IK	IA	IP	SKOR KOMPOSIT BULANAN	KETERANGAN KOMPOSIT BULANAN	INDEKS KOMPOSIT BULANAN (IKB)
1	Tegal	Tegal Barat	2	3	1	6	WASPADA	2
2	Tegal	Tegal Timur	2	3	2	7	WASPADA	2
3	Tegal	Tegal Selatan	2	3	1	6	WASPADA	2
4	Tegal	Margadana	2	3	1	6	WASPADA	2
KOTATegal			2	3	1	6	WASPADA	2

Keterangan :
IK = Indeks Ketersediaan
IA = Indeks Akses
IP = Indeks Pemanfaatan
Skor Komposit Bulanan = IK + IA + IP

Gambar 2. 3 Peta Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Kota Tegal Bulan Desember 2023



Tabel 2. 6 Data Kejadian Bencana Alam Per Kecamatan Bulan Desember 2023

NO.	KOTA	KABUPATEN/KOTA	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN BENCANA	STATUS
1	Tegal	Tegal Barat	Kebakaran Lahan	1	1
2	Tegal	Tegal Timur	-	0	0
3	Tegal	Tegal Selatan	-	0	0
4	Tegal	Margadana	-	0	0
				1	1

Status Warna	Σ Kejadian Bencana
	0
	1-10
	11-50
	50+

II.2 Analisis Situasi Saat Ini

RAD-PG selain berfungsi sebagai instrumental daerah dalam melakukan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi, dengan sendirinya merefleksikan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi di daerah masing-masing. Amanat Undang-Undang Pangan untuk menyusun RAD-PG dapat diselaraskan pelaksanaan kegiatannya terhadap aksi konvergensi penurunan stunting sehingga pemerintah daerah tidak perlu menyusun rencana aksi daerah khusus untuk penurunan stunting hingga terbit peraturan perundang – undangan yang sah yang mengatur tentang RAD penurunan stunting. Dalam menyusun RAD-PG, pemerintah daerah perlu mengacu dan selaras terhadap beberapa dokumen terkait antara lain:

- 1 Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024;
- 2 Dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah);
- 3 Peraturan daerah lainnya di bidang pangan dan gizi yang berlaku di daerah masing-masing;
- 4 Dokumen kebijakan lain yang terkait seperti: Stranas Percepatan Penurunan Stunting, RAD-TPB/SDGs, dan dokumen relevan lainnya terkait pembangunan pangan dan gizi.

RAD-PG disusun untuk memberikan rekomendasi melalui penyesuaian aksi dengan strategi dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi daerah (*local specific*). Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kegiatan yang *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bond*). Sebagai contoh pelaksanaan aksi cegah stunting di pusat yang spesifik menetapkan strategi percepatan pencegahan stunting ke dalam lima pilar dengan target 14,0% prevalensi stunting balita pada tahun 2024.

Untuk menjamin penyelarasan dan implementasi kegiatan pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah maka periode RAD-PG mengikuti periode RAN- PG. Namun demikian, RAD-PG disusun juga selaras dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dll. Selanjutnya, pelaksanaan RAD-PG disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD.

Bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan RAD-PG sebelum pedoman ini diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dapat terus melaksanakan aksi/ program/kegiatan yang tercantum dalam RAD-PG masing-masing dan tidak wajib mengikuti pedoman terbaru. Sedangkan pemerintah daerah yang belum menetapkan RAD-PG wajib mengikuti pedoman ini paling lambat bulan setelah diterbitkannya regulasi yang menetapkan.

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan RPJMD, RPJMN, dan tujuan kedua TPB, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi gap program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan RPJMD.

Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya perbaikan kualitas SDM. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akademia (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi.

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu unsur dari ketahanan pangan. Menurut Sawit dan Ariani bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Sementara itu penentu utama di tingkat rumah tangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan risiko yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut. Menurut FAO (1996) salah satu kunci terpenting dalam mendukung ketahanan pangan adalah tersedianya dana yang cukup (negara dan rumah tangga) untuk memperoleh pangan. Indikator ketahanan pangan juga dapat dilihat dari pangsa pengeluaran pangan. Hukum *Working* 1943 menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan negatif dengan pengeluaran rumah tangga, sedangkan ketahanan pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan. Hal ini berarti semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga semakin rendah ketahanan pangannya.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengamanatkan pembangunan

pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. UU Pangan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Beberapa peraturan lain yang sedang dalam proses penyusunan adalah PP tentang label dan iklan pangan, PP tentang keamanan mutu dan gizi pangan serta Peraturan Presiden tentang kelembagaan pangan nasional.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, disebutkan bahwa Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup tersedia setiap saat. Stabilitas distribusi pangan didefinisikan sebagai kemampuan meminimalkan kesenjangan ketersediaan pangan terhadap permintaan konsumsi pangan, khususnya pada tahun atau musim sulit. Aspek ketersediaan mencakup tingkat nasional, wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2.200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari. Aspek ketersediaan dapat dipenuhi tidak hanya dari potensi domestik saja tetapi juga dari perdagangan antar daerah maupun impor dalam perdagangan luar negeri. Namun demikian akan sangat berbahaya jika suatu wilayah hanya menggantungkan aspek ketersediaan dari impor. Hal ini dikarenakan perdagangan pangan merupakan residual atas terpenuhinya kebutuhan domestiknya, sehingga berimplikasi pada pasar pangan yang cenderung bersifat thin market.

Produksi pangan utama di Kota Tegal maupun daerah-daerah lain salah satunya dipengaruhi oleh luas lahan pertanian yang dimiliki. Lahan pertanian di Kota Tegal adalah 3.913,75 Ha. Terdiri dari 1.412,31Ha pertanian bukan sawah, dan 3.501,45 Ha lahan persawahan.

Tabel 2. 7 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kota Tegal (hektar), 2023

Kecamatan <i>District</i>	Lahan Sawah <i>Wet Land</i>	Lahan Bukan Sawah <i>Non Wet Land</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tegal Selatan	88,36	549,33	637,70
Tegal Timur	7,81	732,97	740,77
Tegal Barat	21,71	1.185,34	1.207,05
Margadana	294,43	1.033,81	1.328,24
Kota Tegal <i>Tegal Municipality</i>	412,31	3.501,45	3.913,75

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2. 8 Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2021

Kecamatan Subdistrict	Luas Panen Harvested Area (ha)	Rata-Rata Produksi Average Production Rate (ku/ha)	Produksi Production (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tegal Selatan	81	64	518,4
Tegal Timur	33	64	211,2
Tegal Barat	24	64	153,6
Margadana	162	64	1 036,8
Kota Tegal Tegal Municipality	300	64	1 920

Sumber: Tegal Dalam Angka tahun 2024

Tabel 2. 9 Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kota tegal (hektar), 2020

Kecamatan Subdistrict	Luas Panen (ha)	Rata-rata Produksi (ku/ha)	Produksi (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tegal Selatan	83	60	498
Tegal Timur	27	60	162
Tegal Barat	33	60	198
Margadana	272	60	1.632
Kota Tegal Tegal Municipality	415	60	2.440

Sumber: Tegal Dalam Angka Tahun 2024

Luas panen, rata-rata produksi, dan produksi padi sawah menurut Kecamatan di Kota Tegal dalam kurun waktu 4 tahun (2020-2023) cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020, luas panen mencapai 415 hektar dengan rata-rata produksi setiap kecamatan 60 ku/ha dan jumlah produksi total sebesar 2.440 ton. Luas panen pada 2021 mencapai sekitar 300 hektar, mengalami penurunan sebanyak 115 hektar atau 27,7 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 415 hektar.

Pada tahun 2023 luas panen mencapai 183 hektar dengan produksi total sejumlah 2.239.20 ton. Hal ini menggambarkan terjadinya penurunan luas panen sebesar 117 atau 39 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 300 hektar. Sedangkan produksi hasil pertanian berbanding terbalik mengalami kenaikan sebesar 319,2 ton atau 14,25 persen.

Tabel 2. 10 Luas Panen Tanaman Sayur Kota Tegal Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman, 2020-2021

Kecamatan Subdistrict	Bawang Merah Shallot		Bayam dan Cesim Spinach and Cesim		Cabai Besar Big Chili		Cabai Rawit Cayenne Pepper	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tegal Selatan	32	22	6	24	-	-	-	-
Tegal Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
Tegal Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Margadana	148	78	37	41	-	-	-	-
Kota Tegal Tegal Municipality	180	100	43	65	-	-	-	-

Kecamatan Subdistrict	Kangkung Water Spinach		Ketimun Cucumber		Terung Eggplant	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tegal Selatan	-	1	-	-	1	-
Tegal Timur	-	-	-	-	-	-
Tegal Barat	-	-	-	-	-	-
Margadana	20	33	-	-	5	-
Kota Tegal Tegal Municipality	20	34	-	-	6	-

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan data luas panen tanaman sayuran di Kota Tegal dari tahun 2020 hingga 2021, terjadi fluktuasi yang signifikan dalam luas lahan yang digunakan untuk produksi sayuran. Pada tahun 2020, luas panen tanaman sayuran tercatat sebesar 249 hektar. Pada tahun berikutnya, yaitu 2021, terjadi penurunan luas panen sebesar 20,08%, dengan luas panen hanya mencapai 199 hektar.

Tabel 2. 11 Luas Panen Tanaman Sayur Kota Tegal Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman, 2022-2023

Kecamatan District	Bawang Merah Shallot		Bayam Spinach		Cabai Besar Big Chili		Cabai Rawit Cayenne Pepper	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tegal Selatan	22	10	32	31	-	-	-	-
Tegal Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
Tegal Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Margadana	78	63	63	70	-	-	-	-
Kota Tegal Tegal Municipality	100	73	95	101	-	-	-	-

Kecamatan District	Kangkung Water Spinach		Petsai/Sawi Chinese Cabbage/ Mustard Green		Jamur Tiram (m²) King Oyster Mushrooms (m²)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tegal Selatan	20	35	30	28	42	42
Tegal Timur	-	-	-	-	50	50
Tegal Barat	-	-	-	-	-	-
Margadana	59	39	68	55	42	42
Kota Tegal Tegal Municipality	79	74	98	83	134	134

Sumber: Kota tegal Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2022, luas panen tanaman sayuran tercatat mencapai 506 hektar. Namun, pada tahun 2023, luas panen mengalami penurunan menjadi 465 hektar. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan luas panen sebesar 41 hektar atau sekitar 8,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 12 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tegal (kuintal), 2020-2021

Kecamatan District	Bawang Merah Shallot		Bayam Spinach		Cabai Besar Big Chili		Cabai Rawit Cayenne Pepper	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tegal Selatan	2.530	1.150	2.716	2.790	-	-	-	-
Tegal Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
Tegal Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Margadana	8.855	7.290	4.775	6.220	-	-	-	-
Kota Tegal Tegal Municipality	11.385	8.440	7.491	9.010	-	-	-	-

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan data produksi tanaman sayuran di Kota Tegal dari tahun 2020 hingga 2021, terlihat adanya penurunan yang signifikan dalam total produksi. Pada tahun 2020, produksi tanaman sayuran mencapai 23.808 kuintal, sedangkan pada tahun 2021, angka ini menurun menjadi 17.980 kuintal. Penurunan produksi sebesar 5.828 kuintal dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengindikasikan adanya perubahan yang cukup besar dalam sektor pertanian sayuran. Dalam bentuk persentase, penurunan ini mencapai sekitar 24,4%.

Tabel 2. 13 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tegal (kuintal), 2022-2023

Kecamatan <i>District</i>	Kangkung <i>Water Spinach</i>		Petsai/Sawi <i>Chinese Cabbage/ Mustard Green</i>		Jamur Tiram (kg) <i>King Oyster Mushrooms (kg)</i>	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tegal Selatan	1.000	2.350	2.655	2.520	6	6
Tegal Timur	-	-	-	-	6	6
Tegal Barat	-	-	-	-	-	-
Margadana	3.500	2.630	6.120	5.150	6	6
Kota Tegal <i>Tegal Municipality</i>	4.500	4.980	8.775	7.670	18	18

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data produksi tanaman sayuran di Kota Tegal pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan dalam total produksi tanaman sayuran. Pada tahun 2022, jumlah produksi mencapai 32.169 kuintal, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 30.118 kuintal. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan produksi sebesar 2.051 kuintal dari tahun 2022 ke tahun 2023. Jika dikonversikan dalam bentuk persentase, penurunan ini mencapai sekitar 6,37%.

Tabel 2. 14 Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Jenis Buah di Kota Tegal

Jenis Tanaman <i>Kind of Plant</i>	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alpukat/ <i>Avocado</i>	-	-	5	6
Belimbing/ <i>Star fruit</i>	-	80	260	738
Jambu air/ <i>Water apple</i>	67	65	75	109
Jambu biji/ <i>Guava</i>	11	-	-	-
Mangga/ <i>Mango</i>	714	2.175	2.644	10.615
Nangka/ <i>cempedak/ Jack fruit</i>	53	52	-	-
Pepaya/ <i>Papaya</i>	414	385	323	372
Pisang/ <i>Banana</i>	2.111	795	500	698
Sukun/ <i>Breadfruit</i>	-	-	8	-

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2023

Produksi tanaman buah-buahan di Kota Tegal selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan lonjakan signifikan pada akhir periode. Pada tahun 2020, produksi buah-buahan tercatat sebesar

3.370 kuintal. Tahun berikutnya, produksi mengalami peningkatan moderat menjadi 3.552 kuintal, mencerminkan pertumbuhan yang stabil dalam sektor ini. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2022, dengan total produksi mencapai 3.815 kuintal, menunjukkan perkembangan yang konsisten dalam produksi buah-buahan. Namun, lonjakan paling mencolok terjadi pada tahun 2023, di mana produksi melonjak drastis menjadi 12.538 kuintal, mencatatkan peningkatan luar biasa sebesar 228% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas buah dengan produksi paling banyak adalah mangga, dengan produksi di tahun 2023 sebesar 10.615 ton.

Tabel 2. 15 Populasi Ternak (ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Tegal, 2020

Kecamatan Subdistrict	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Kuda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tegal Selatan	21	-	836	542	-
Tegal Timur	-	-	709	959	-
Tegal Barat	6	-	407	523	-
Margadana	2	21	914	699	-
Kota Tegal Tegal Municipality	29	21	2.866	2.693	-

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2. 16 Populasi Ternak (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Tegal, 2022

Kecamatan Subdistrict	Sapi Potong Beef Cattle	Kerbau Buffalo	Kambing Goat	Domba Sheep	Kuda Horse
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tegal Selatan	19	-	939	617	-
Tegal Timur	2	-	577	863	-
Tegal Barat	4	-	487	542	-
Margadana	3	-	764	670	-
Kota Tegal Tegal Municipality	28	-	2.767	2.692	-

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2. 17 Populasi Ternak (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Tegal, 2023

Kecamatan District	Sapi Potong Beef Cattle	Kerbau Buffalo	Kambing Goat	Domba Sheep	Kuda Horse
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tegal Selatan	17	-	1.212	694	-
Tegal Timur	-	-	725	555	-
Tegal Barat	4	-	465	455	-
Margadana	-	-	837	621	-
Kota Tegal Tegal Municipality	21	-	3.239	2.325	-

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2022

Populasi ternak di Kota Tegal kondisinya fluktuatif. Populasi sapi potong mengalami penurunan. Pada tahun 2020 semula 29 ekor, kemudian pada tahun 2022 menjadi 28 ekor, dan pada tahun 2023 turun menjadi 21 ekor. Populasi kambing bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 sebanyak 2.866 ekor. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2.692 ekor. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 3.239 ekor. Pada domba mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 2.693. Kemudian tahun 2022 menjadi 2.692 dan tahun 2023 kembali turun menjadi 2.325 ekor.

Tabel 2. 18 Pemotongan Ternak (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Tegal, 2020

Kecamatan Subdistrict	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tegal Selatan	89	-	6.447	5.799
Tegal Timur	194	170	3.326	3.364
Tegal Barat	187	-	5.073	4.938
Margadana	63	-	3.622	3.442
Kota Tegal Tegal Municipality	533	170	18.468	17.543

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2. 19 Pemotongan Ternak (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Tegal, 2021

Kecamatan Subdistrict	Sapi Potong ² Beef Cattle	Babi ³ Pig	Kambing Goat	Domba Sheep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tegal Selatan	95	-	6 433	5 024
Tegal Timur	57	231	3 371	3 383
Tegal Barat	101	-	5 074	4 709
Margadana	52	-	3 596	3 449
Kota Tegal Tegal Municipality	305	231	18 474	16 565

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2. 20 Pemotongan Ternak (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Tegal, 2023

Kecamatan District	Sapi Potong ² Beef Cattle	Babi ¹ Pig	Kambing Goat	Domba Sheep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tegal Selatan	208	-	6.523	4.618
Tegal Timur	98	478	5.105	6.220
Tegal Barat	198	-	4.677	4.353
Margadana	49	-	3.162	3.929
Kota Tegal Tegal Municipality	553	478	19.467	19.120

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2023

Penurunan jumlah populasi ternak di Kota Tegal antara lain disebabkan karena adanya pemotongan ternak untuk konsumsi. Pemotongan ternak di Kota Tegal berdasarkan data yang ada dilakukan di rumah pemotongan hewan dan di luar rumah pemotongan hewan. Jenis ternak yang dipotong paling banyak di Kota Tegal adalah Kambing, di tahun 2023 jumlahnya mencapai 19.467 ekor. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Adapun untuk komoditas domba, kambing dan sapi jumlahnya mengalami penurunan.

Tabel 2. 21 Populasi Unggas (ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Tegal, 2020

Kecamatan Subdistrict	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik	Puyuh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tegal Selatan	15.240	-	-	17.000
Tegal Timur	9.051	-	-	-
Tegal Barat	11.054	557.750	35.369	-
Margadana	18.600	110.500	244.994	-
Kota Tegal Tegal Municipality	53.945	668.250	280.363	17.000

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2. 22 Populasi Unggas (ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Tegal, 2021

Kecamatan Subdistrict	Ayam Kampung Native Chicken	Ayam Pedaging Broiler	Itik Duck	Puyuh Quail
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tegal Selatan	15 240	-	-	17 150
Tegal Timur	9 049	-	-	-
Tegal Barat	11 054	860 572	35 350	-
Margadana	18 599	-	244 950	-
Kota Tegal Tegal Municipality	53 942	860 572	280 300	17 150

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2. 23 Populasi Unggas (ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Tegal, 2023

Kecamatan District	Ayam Kampung Native Chicken	Ayam Pedaging Broiler	Itik Duck	Puyuh Quail
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tegal Selatan	14.375	-	-	17.600
Tegal Timur	7.359	-	-	-
Tegal Barat	10.268	1.307.650	34.000	-
Margadana	18.203	-	226.000	-
Kota Tegal Tegal Municipality	50.205	1.307.650	260.000	17.600

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2022

Populasi unggas di Kota Tegal rata-rata fluktuatif. Jumlah ayam kampung bersifat fluktuatif, pada tahun 2021 sebanyak 53.945. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 53.942 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 50.205. Ayam Pedaging mengalami kenaikan dari tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 sebesar 668.250, pada tahun 2021 menjadi 860.572, dan pada tahun 2023 mengalami lonjakan hingga mencapai 1.207.650. Pada Itik

mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 280.363. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 280.600 dan pada tahun 2023 menjadi 260.000. Sedangkan puyuh mengalami kenaikan, pada tahun 2021 sebesar 17.000. Pada tahun 2021 menjadi 17.150 dan pada tahun 2023 menjadi 17.600.

Pengeluaran Penduduk

34,53% penduduk Kota Tegal memiliki pengeluaran per kapita per bulan diatas Rp 1.500.000 pada tahun 2021. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Tegal Rp. 1.5222.241/kapita/bulan. Pengeluaran penduduk dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1 Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.
- 2 Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja tidak termasuk konsumsi atau pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.
- 3 Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pendapatan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya data tersebut sangat sulit diperoleh sehingga diperlukan indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat pendapatan. Salah satunya adalah menggunakan data pengeluaran rumah tangga. Pada kegiatan SUSENAS data pengeluaran dikelompokkan menjadi pengeluaran makanan dan bukan makanan. Dengan melihat data pengeluaran dua kelompok tersebut dapat tergambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Penduduk Kota Tegal pada tahun 2021 memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sekitar Rp. 1.522.241,-. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari sebesar 2.135,67 Kkal dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari sebesar 66,41 gram. Jika dilihat total pengeluaran untuk kelompok bukan makanan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang lebih tinggi dibanding pengeluaran makanan yaitu Rp. 795.634,- untuk kelompok bukan makanan, dan Rp. 726.607,- untuk kelompok makanan. Untuk kelompok makanan proporsi paling besar untuk pembelian makanan dan minuman jadi (47,67 persen) serta untuk pembelian rokok (11,03 persen) yang sedikit di atas pembelian padi-padian (8,13 persen).

Jika dilihat nilainya rata-rata pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 346.371,- per kapita per bulan sedangkan untuk rokok sebesar Rp. 80.161,- dan untuk pengeluaran padi-padian sebesar Rp. 59.089,-. Pada kelompok bukan makanan penduduk melakukan belanja yang cukup besar pada kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga serta aneka barang dan jasa. Jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran untuk kelompok bukan makanan memiliki proporsi pengeluaran sebesar 48,98 persen untuk belanja

komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga serta 26,79 persen untuk pengeluaran aneka barang dan jasa. Atau sebesar Rp. 389.723,- per kapita per bulan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga serta Rp. 213.512,- untuk aneka barang dan jasa.

Penduduk Kota Tegal pada tahun 2023 memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sekitar Rp 1.750.336,00. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari sebesar 2.146,41 Kkal dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari sebesar 67,58 gram. Jika dilihat menurut kelompok komoditas yang dikonsumsi, Pada tahun 2023 rata-rata pengeluaran per kapita komoditas makanan lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk komoditas non makanan, masing-masing sebesar Rp 87.635,00 dan Rp 922.701,00. Lebih rinci untuk pengeluaran komoditas makanan paling banyak berupa makanan dan minuman jadi, diikuti oleh pengeluaran untuk rokok dan tembakau. Pada kelompok pengeluaran bukan makanan, pengeluaran paling banyak pada tahun 2023 digunakan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 2. 24 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita, Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita dan rata-Rata Konsumsi Protein Per Kapita

Uraian	2019	2021	2023
Rata-rata pengeluaran perkapita (Rp/bulan)	Rp. 1. 217.314,-	Rp. 1.522.241,-	Rp 1.750.336,00.
Rata-rata konsumsi kalori per kapita (Kkal/hari)	2.114,52 Kkal	2.135,67 Kkal	2.146,41 Kkal
Rata-rata konsumsi protein per kapita (Gram/hari)	66,20 gram	66,41 gram	67,58 gram

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, terdapat perubahan signifikan dalam rata-rata pengeluaran dan konsumsi pangan per kapita di masyarakat. Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp1.217.314 per bulan. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2021 menjadi Rp1.522.241 per bulan, dan terus meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi Rp1.750.336 per bulan.

Selain itu, konsumsi pangan juga menunjukkan tren peningkatan dalam aspek kalori dan protein. Rata-rata konsumsi kalori per kapita meningkat dari 2.114,52 Kkal per hari pada tahun 2019 menjadi 2.135,67 Kkal pada tahun 2021, dan mencapai 2.146,41 Kkal pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam ketersediaan dan kualitas makanan yang dikonsumsi.

Konsumsi protein per kapita juga mengalami peningkatan, dari 66,20 gram per hari pada tahun 2019 menjadi 66,41 gram pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 67,58 gram pada tahun 2023. Peningkatan konsumsi protein ini menandakan bahwa masyarakat semakin mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber protein yang penting untuk kesehatan.

Penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganekaragamkan jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian penganekaragaman pangan ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, penganekaragaman horizontal, yaitu upaya untuk menganekaragamkan konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan; kedua upaya meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas tersebut.

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk ,menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Skor pola pangan harapan di Kota Tegal menunjukkan angka yang fluktuatif namun sedikit mengalami tren peningkatan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 sebesar 94% naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 84%.

II.2.1 Situasi Gizi

a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Kasus kematian ibu menjadi salah satu sasaran strategis pembangunan di bidang kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2023 mengalami perkembangan secara fluktuatif. Untuk mengurangi angka kematian ibu (AKI), berbagai program dan pendekatan dapat diterapkan dengan fokus pada perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Berikut adalah beberapa program dan strategi yang terbukti efektif dalam mengurangi angka kematian ibu:

1. Peningkatan Akses ke Perawatan Kesehatan:

- Pemeriksaan Prenatal Rutin: Menyediakan pemeriksaan kesehatan secara rutin selama kehamilan untuk deteksi dini masalah kesehatan dan komplikasi.
- Pelayanan Persalinan yang Aman: Menjamin bahwa semua ibu memiliki akses ke fasilitas persalinan yang aman dan tenaga medis yang terlatih, seperti dokter, bidan, dan perawat.

2. Edukasi dan Kesadaran:

- Pendidikan Kesehatan: Melaksanakan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.
- Pelatihan Tenaga Kesehatan: Memberikan pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga medis tentang praktik terbaik dalam manajemen kehamilan dan persalinan.

3. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi:

- Deteksi Dini dan Pengelolaan Komplikasi: Mengimplementasikan program untuk deteksi dini dan penanganan komplikasi seperti preeklampsia, diabetes gestasional, dan perdarahan pasca-persalinan.
- Pengobatan Cepat dan Efektif: Menyediakan akses yang cepat dan efektif untuk pengobatan komplikasi, termasuk penggunaan obat-obatan dan intervensi medis yang diperlukan.

4. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan:

- Fasilitas Kesehatan Berkualitas: Memastikan bahwa rumah sakit dan klinik dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan medis yang memadai.
- Perbaikan Infrastruktur Transportasi: Meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk memudahkan ibu hamil mencapai fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil.

5. Dukungan Pasca Persalinan:

- Perawatan Pasca Persalinan: Menyediakan pemantauan kesehatan ibu setelah melahirkan, termasuk pemeriksaan untuk masalah kesehatan fisik dan mental.
- Dukungan Kesehatan Mental: Menawarkan layanan konseling dan dukungan untuk masalah kesehatan mental pasca-persalinan seperti depresi post-partum.

6. Nutrisi dan Kesehatan:

- Program Nutrisi: Menyediakan suplemen dan program nutrisi untuk ibu hamil guna mencegah defisiensi gizi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi.
- Edukasi Nutrisi: Mendidik ibu hamil tentang pentingnya diet seimbang dan asupan nutrisi yang tepat selama kehamilan.

7. Keterlibatan Komunitas:

- Program Kader Kesehatan: Melatih kader kesehatan komunitas untuk memberikan pendidikan dan dukungan kepada ibu hamil di tingkat lokal.
- Keterlibatan Keluarga: Mendorong keterlibatan keluarga dan komunitas dalam perawatan ibu hamil dan persalinan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.

8. Kemitraan dan Kolaborasi:

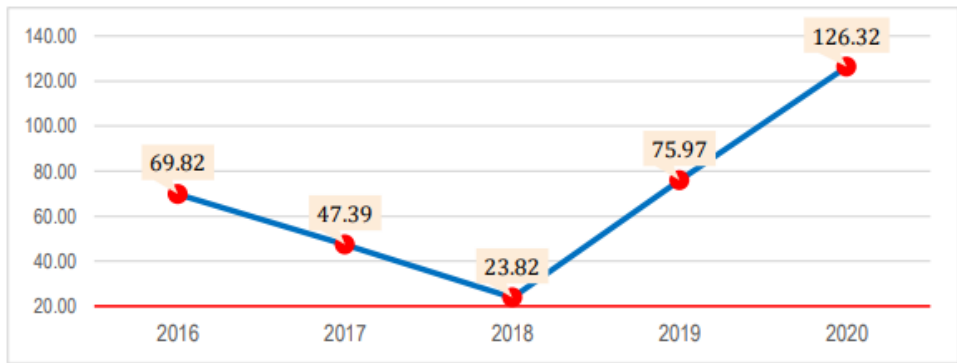
- Kerja Sama dengan NGO dan Pemerintah: Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan badan pemerintah untuk memperluas cakupan program kesehatan ibu.
- Kemitraan Swasta: Mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan dan fasilitas yang diperlukan.

9. Pemantauan dan Evaluasi:

- Pengumpulan Data: Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai angka kematian ibu untuk mengidentifikasi tren dan area yang membutuhkan perhatian.
- Evaluasi Program: Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah diterapkan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka Kematian Ibu di Kota Tegal tahun 2016-2020 ditunjukkan pada grafik berikut:

Gambar 2. 4 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tegal Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2021

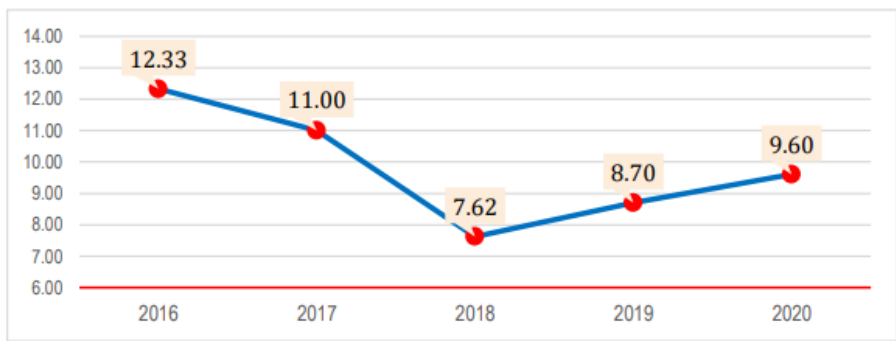
Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dalam kurun tahun 2016-2020 menunjukan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016, AKI berada di angka 69.82. Kemudian, terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 47.39, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan kesehatan ibu di Kota Tegal pada periode tersebut. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2018, dengan AKI mencapai titik terendah di angka 23.82. Namun, mulai tahun 2019, AKI kembali mengalami peningkatan drastis, naik menjadi 75.97. Kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2020, di mana AKI melonjak tajam menjadi 126.32.

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Data AKB ini dapat digunakan sebagai dasar merencanakan program program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Grafik berikut menunjukkan AKB di Kota Tegal Tahun 2016-2020:

Gambar 2. 5 Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Tegal Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2020

Angka kematian bayi (AKB) di Kota Tegal selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukan tren yang fluktuatif. AKB pada tahun 2016 sebanyak 12.33, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 11.00 dan tahun 2018 menjadi 7.62. Namun angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebanyak 8.70 dan pada tahun 2020 sebanyak 9.60.

Dengan demikian sangat perlu upaya-upaya untuk tetap mempertahankan dan menurunkan AKB, mengingat AKB adalah indikator pembangunan kesehatan yang paling sensitif selain angka kematian ibu. Mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah tujuan penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Program yang efektif untuk mengurangi AKB biasanya melibatkan pendekatan *multi-faceted* dan berfokus pada berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Berikut adalah beberapa komponen penting yang bisa dipertimbangkan dalam merancang program untuk mengurangi AKB:

1. Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan:

- Pendidikan Prenatal: Memberikan informasi kepada ibu hamil tentang pentingnya perawatan prenatal, nutrisi, tanda-tanda bahaya selama kehamilan, dan persiapan untuk persalinan.
- Penyuluhan Kesehatan Keluarga: Mengedukasi keluarga tentang cara merawat bayi yang baru lahir, termasuk pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan perawatan kesehatan dasar.

2. Akses ke Perawatan Kesehatan:

- Perawatan Prenatal: Menyediakan akses yang lebih baik ke pemeriksaan kehamilan rutin dan perawatan medis selama kehamilan.
- Pelayanan Kesehatan Berkualitas: Memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan perawatan medis yang memadai selama persalinan dan setelah melahirkan.

3. Nutrisi dan Kesehatan Ibu:

- Suplementasi Nutrisi: Memberikan suplemen zat besi, asam folat, dan vitamin lainnya kepada ibu hamil untuk mencegah defisiensi yang dapat memengaruhi kesehatan bayi.
- Program Gizi: Menyediakan makanan bergizi dan dukungan nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui.

4. Imunisasi dan Pencegahan Penyakit:

- Imunisasi Bayi: Memastikan bayi mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal untuk mencegah penyakit infeksi.
- Vaksinasi Ibu: Memberikan vaksinasi kepada ibu hamil untuk melindungi bayi dari penyakit tertentu setelah lahir.

5. Pelayanan Kesehatan Neonatal:

- Perawatan Intensif Neonatal: Menyediakan unit perawatan intensif neonatal untuk bayi prematur atau bayi dengan masalah kesehatan serius.
- Pendidikan Perawatan Bayi: Mengajarkan orang tua tentang tanda-tanda masalah kesehatan pada bayi dan cara merawat bayi dengan kondisi medis khusus.

6. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan:

- Fasilitas Kesehatan: Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik bersalin, agar dapat memberikan perawatan yang lebih baik.
- Pelatihan Tenaga Kesehatan: Melatih tenaga medis, termasuk bidan dan dokter, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam perawatan ibu dan bayi.

7. Program Dukungan Sosial dan Ekonomi:

- Bantuan Sosial: Memberikan dukungan finansial atau bantuan sosial kepada keluarga berisiko tinggi untuk memastikan mereka memiliki akses ke perawatan kesehatan dan kebutuhan dasar.
- Dukungan Psikososial: Menyediakan dukungan emosional dan konseling bagi ibu untuk mengurangi stres dan depresi pascapersalinan.

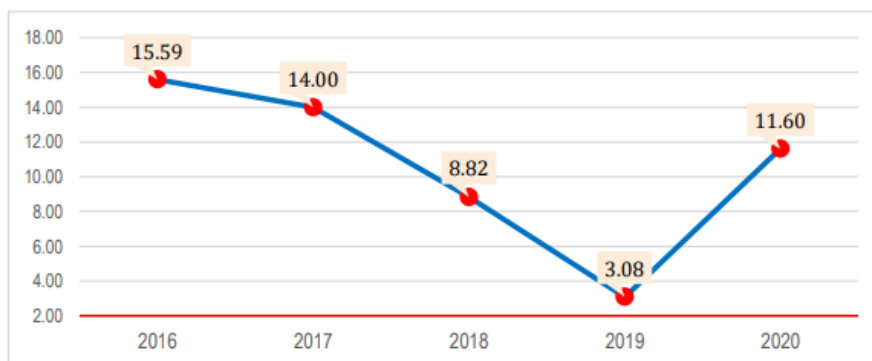
8. Pemantauan dan Evaluasi:

- Pengumpulan Data: Mengumpulkan data tentang AKB untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
- Penelitian dan Pengembangan: Melakukan penelitian untuk menemukan pendekatan baru yang efektif dalam mengurangi AKB dan memperbaiki program yang ada.

c) Angka Kematian Balita (AKABa)

Angka Kematian Balita (AKABa) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. AKABa di Kota Tegal lebih rendah dibandingkan dengan AKB. Grafik berikut ini menunjukkan data angka kematian balita di Kota Tegal tahun 2016-2020:

Gambar 2. 6 Grafik Angka Kematian (AKABa) Kota Tegal Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2021

Upaya untuk menurunkan kematian Balita berupa pemantauan tumbuh kembang Balita dan kunjungan Balita terstandar membawa hasil yang sesuai harapan. Angka Kematian Balita (AKABa) pada tahun 2016 sebesar 15.59, mengalami penurunan hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 menjadi 14.00, tahun 2018 menjadi 8.82, hingga pada tahun 2019 menjadi 3.08. Disisi lain, Angka kematian Balita (AKABa) dari tahun 2019 ke tahun 2020 justru melonjak dengan sangat signifikan yaitu menjadi 11.60. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Tegal, khususnya terkait upaya pemenuhan gizi dalam rangka tumbuh kembang anak.

Mengurangi Angka Kematian Balita (AKABa) adalah salah satu tujuan kesehatan masyarakat yang sangat penting. Berikut adalah beberapa langkah program yang dapat membantu menurunkan AKABa:

1. Pendidikan dan Kesadaran

- Edukasi Kesehatan: Kampanye tentang pentingnya vaksinasi, nutrisi yang tepat, dan perawatan kesehatan dasar untuk ibu dan anak.

- Pelatihan Kader Kesehatan: Melatih tenaga kesehatan komunitas atau kader kesehatan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada keluarga di tingkat lokal.

2. Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan

- Vaksinasi: Memastikan bahwa anak-anak mendapatkan vaksinasi lengkap sesuai jadwal.
- Pemeriksaan Rutin: Meningkatkan akses dan frekuensi pemeriksaan kesehatan untuk balita, termasuk deteksi dini penyakit dan penanganan masalah kesehatan.

3. Perbaikan Nutrisi

- Program Pemberian Makanan Tambahan: Memberikan makanan tambahan yang bergizi bagi balita, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.
- Edukasi Gizi: Mengedukasi ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan pemberian makanan pendamping yang sehat.

4. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan

- Pusat Kesehatan: Membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- : Menyediakan peralatan medis yang memadai dan obat-obatan yang diperlukan untuk perawatan balita.

5. Peralatan Medis Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan

- Program Sosial: Menyediakan bantuan sosial dan program peningkatan ekonomi bagi keluarga miskin, seperti bantuan langsung tunai atau program pengembangan usaha.
- Kesejahteraan Keluarga: Program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dapat membantu mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan.

6. Pencegahan dan Penanganan Penyakit

- Pencegahan Penyakit: Kampanye pencegahan penyakit menular dan tidak menular, seperti diare dan pneumonia.
- Penanganan Darurat: Menyediakan akses cepat ke perawatan darurat untuk kasus-kasus kritis.

7. Monitoring dan Evaluasi

Pengumpulan Data: Mengumpulkan dan menganalisis data tentang kematian balita untuk mengidentifikasi tren dan area yang membutuhkan perhatian khusus.

Evaluasi Program: Menilai efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi.

8. Kolaborasi dan Kemitraan

- Kemitraan dengan Organisasi: Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, donor internasional, dan sektor swasta untuk meningkatkan sumber daya dan dukungan.

- Kolaborasi Pemerintah dan Swasta: Membangun kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung program kesehatan anak.

Tabel 2. 25 Perkembangan Capaian Kinerja AKI, AKB dan AKABa Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Realiasi Kinerja					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	23,83	75,97	126	106,61	122,50	85,47
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	10	3,08	11,62	5,86	12,62	7,41
3.	Angka Kematian Balita (AKABa)	per 1000 KH	10,20	10	6,5	7,45	4,21	9,4

Salah satu permasalahan yang cukup krusial untuk diatasi terkait gizi adalah stunting. Stunting atau balita pendek disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan seperti gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita ataupun infeksi akan tetapi juga dapat disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan. Dikategorikan berdasarkan faktornya, penyebab stunting dapat dikategorikan pada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Dua faktor langsung yang mempengaruhi status gizi adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi malnutrition, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan malnutrition.

Kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi oleh pendidikan ibu karena menentukan pemahaman ibu terhadap pola asuh anak yang baik. Angka prevalensi stunting di Kota Tegal Tahun 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

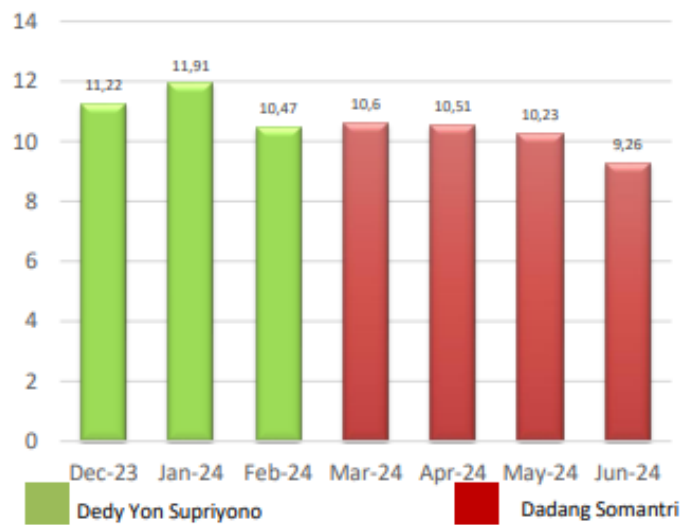
Tabel dibawah menjelaskan angka prevalensi stunting (target dan realisasi) dengan metode perhitungan SSGI dan E-PPGBM adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 26 Kondisi Capaian Situasi Gizi Kota Tegal Tahun 2021-2024

Metode Perhitungan	2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
SSGI	21,1	23,9	20,4	16,8	16	22,3	14
E-PPGBM	4,7	5,51	4,65	9,94	4,6	8,86	4,55

Pada periode 2021-2024, capaian situasi gizi di Kota Tegal menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021, realisasi mencapai 23,9, melampaui target 21,1. Namun, pada tahun 2022, realisasi turun ke 16,8 dari target 20,4, sebelum kembali naik menjadi 22,3 pada tahun 2023, melampaui target 16. Sementara itu, perhitungan E-PPGBM menunjukkan pencapaian yang bervariasi: pada tahun 2021, realisasi 5,51 melebihi target 4,7; pada 2022, pencapaian melonjak menjadi 9,94 dari target 4,65; sama halnya tahun sebelumnya pada 2023, realisasi naik ke 8,66 dari target 4,6. Data ini mencerminkan adanya kemajuan dalam beberapa tahun, namun juga menunjukkan tantangan yang harus diatasi dalam implementasi program gizi.

Gambar 2. 7 Grafik Prevalensi Stunting Berdasarkan Hasil Penimbangan Desember 2023 s.d Juni 2024



Keterangan: Jumlah Balita yang di Ukur (data Per Juni 2024) sebanyak 11.204 anak Jumlah Balita Stunting sebanyak 1.038 anak atau 9,26% Balita Stunting.

Grafik prevalensi stunting dari Desember 2023 hingga Juni 2024 menunjukkan penurunan yang konsisten. Dimulai dengan prevalensi stunting sebesar 11,22% pada Desember 2023, angka ini sedikit meningkat menjadi 11,91% pada Januari 2024. Namun, sejak Februari 2024, prevalensi stunting mulai menurun, mencapai 10,47% namun pada bulan maret sedikit naik menjadi 10,6%. Sedangkan pada pada April kembali turun menjadi 10,51%. Penurunan berlanjut di bulan Mei dengan angka 10,23% dan mencapai titik terendah di bulan Juni 2024 pada 9,26%. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam prevalensi stunting sepanjang periode tersebut.

Tabel 2. 27 Rekapitulasi Stunting Bulan Juni 2024

No	Desa/Kelurahan	USIA 0-6 BLN			USIA 6-23 BLN			USIA 24-59 BLN			USIA 0-59 BLN		
		Sasaran	Stunting	%	Sasaran	Stunting	%	Sasaran	Stunting	%	Sasaran	Stunting	%
1.	DEBONG KULON	16	0	0,00	97	8	8,25	192	23	11,98	305	31	10,16
2.	DEBONG TENGAH	21	0	0,00	191	7	3,66	421	63	14,96	633	70	11,06
3.	RANDUGUNTING	32	0	0,00	186	9	4,84	413	45	10,90	631	54	8,56
4.	KALINYAMAT WETAN	11	0	0,00	71	4	5,63	112	8	7,14	194	12	6,19
5.	BANDUNG	17	0	0,00	106	7	6,60	162	9	5,56	285	16	5,61
6.	DEBONG KIDUL	14	1	7,14	62	4	6,45	109	7	6,42	185	12	6,49
7.	TUNON	16	0	0,00	114	5	4,39	150	11	7,33	280	16	5,71
8.	KETUREN	12	1	8,33	71	6	8,45	112	8	7,14	195	15	7,69
9.	PANGGUNG	110	5	4,55	363	38	10,47	722	103	14,27	1195	146	12,22
10.	MANGKUKUSUMAN	15	0	0,00	44	6	13,64	92	6	6,52	151	12	7,95
11.	MINTARAGEN	23	0	0,00	174	20	11,49	332	56	16,87	529	76	14,37
12.	KEJAMBON	23	0	0,00	152	10	6,58	319	23	7,21	494	33	6,68
13.	SLEKOK	48	0	0,00	205	12	5,85	483	31	6,42	736	43	5,84
14.	KRATON	37	0	0,00	196	18	9,18	384	41	10,68	617	59	9,56
15.	TEGALSARI	63	2	3,17	314	18	5,73	597	46	7,71	974	66	6,78
16.	MUARAREJA	30	0	0,00	167	10	5,99	312	26	8,33	509	36	7,07
17.	PESURUNGAN KIDUL	30	1	3,33	101	7	6,93	275	25	9,09	406	33	8,13
18.	DEBONG LOR	12	0	0,00	70	7	10,00	164	17	10,37	246	24	9,76
19.	KEMANDUNGAN	12	0	0,00	35	2	5,71	106	12	11,32	153	14	9,15
20.	PEKAUMAN	23	0	0,00	81	4	4,94	172	27	15,70	276	31	11,23
21.	MARGADANA	46	2	4,35	242	29	11,98	423	67	15,84	711	98	13,78
22.	KALINYAMAT KULON	13	1	7,69	84	8	9,52	150	22	14,67	247	31	12,55
23.	SUMURPANGGANG	13	0	0,00	109	7	6,42	186	15	8,06	308	22	7,14
24.	PESURUNGAN LOR	15	0	0,00	86	11	12,79	163	26	15,95	264	37	14,02
25.	KALIGANGSA	28	1	3,57	100	8	8,00	182	20	10,99	310	29	9,35
26.	KRANDON	10	0	0,00	52	1	1,92	104	12	11,54	166	13	7,83
27.	CARAWAN	20	0	0,00	62	4	6,45	122	5	4,10	204	9	4,41
KOTA TEGAL		710	14	1,97	3535	270	7,64	6959	754	10,83	11204	1038	9,26

Tabel tersebut menyajikan data mengenai jumlah sasaran dan prevalensi stunting di berbagai desa/kelurahan di Kota Tegal, yang dikelompokkan berdasarkan rentang usia anak, yaitu 0-6 bulan, 6-23 bulan, 24-59 bulan, dan 0-59 bulan. Pada kelompok usia 0-6 bulan, terdapat total 710 anak dengan sasaran, di mana 14 anak di antaranya mengalami stunting, sehingga prevalensi stunting pada kelompok ini adalah 1,97%. Desa/kelurahan dengan prevalensi stunting tertinggi pada kelompok usia ini adalah Pesurungan Kidul, dengan 3 anak (3,33%) yang mengalami stunting. Pada kelompok usia 6-23 bulan, dari 3.535 anak yang menjadi sasaran, sebanyak 270 anak mengalami stunting, dengan prevalensi 7,64%. Mangkusuman menjadi desa/kelurahan dengan prevalensi stunting tertinggi pada kelompok usia ini, yaitu 13,64% atau 6 anak.

Selanjutnya, pada kelompok usia 24-59 bulan, dari 6.959 anak, sebanyak 754 anak mengalami stunting, menghasilkan prevalensi stunting sebesar 10,83%. Panggung menempati posisi tertinggi dalam kelompok usia ini dengan 103 anak atau 14,27% yang mengalami stunting. Jika dilihat secara

keseluruhan pada kelompok usia 0-59 bulan, terdapat 11.204 anak dengan sasaran, di mana 1.038 anak mengalami stunting, menghasilkan prevalensi stunting sebesar 9,26%. Desa/kelurahan dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Margadana, di mana 138 anak atau 13,78% dari total sasaran mengalami stunting. Data ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam prevalensi stunting di berbagai desa/kelurahan di Kota Tegal, dengan beberapa wilayah seperti Margadana dan Panggung menunjukkan angka prevalensi yang lebih tinggi daripada rata-rata, yang menandakan perlunya intervensi yang lebih intensif di wilayah-wilayah tersebut.

Identifikasi Kendala/Permasalahan Saat Ini

1. Remaja Putri

- Pelaksanaan SESekda No 440/003/2022 untuk minum tablet tambah darah setiap Jumat di sekolah belum dilaksanakan secara benar.
- 60% remaja putri mengalami anemia, hasil anamnesis sebagian besar tidak mengkonsumsi Fe secara benar.

2. Calon Pengantin

- Belum adanya evaluasi bagi calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).
- Calon Pasangan Usia Subur (PUS) masih jarang yang melakukan pemeriksaan di Fasyankes 3 (tiga) bulan pranikah.
- Hasil tindak lanjut pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang bermasalah belum dapat dievaluasi karena jarak antara pemeriksaan dan menikah waktunya berdekatan.

3. Bayi dan Balita

- Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif masih rendah. Pengetahuan masyarakat sudah bagus namun untuk pelaksanaannya masih kesulitan, misalnya ibu muda yang bekerja yang membuat sulit melakukan perah ASI.
- MP-ASI yang diberikan tidak sesuai sehingga masalah gizi balita muncul di usia 6 bulan ke atas.
- Kurang telatennya orang tua dalam melakukan perawatan bagi balita gizi buruk.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan di Posyandu. Balita yang diukur timbang masih dibawah target yaitu 80%.
- Pemberian PMT Pemulihan yang sudah diberikan tidak akan berhasil secara optimal jika tidak didukung oleh keluarga dalam memberikan makanan secara benar (PMBA yang tepat).
- Orang tua menolak imunisasi karena alasan keyakinan.

4. Sanitasi

- Masih ditemukan beberapa tempat untuk Buang Air Besar (BAB) di ruang terbuka.
- Kondisi rumah perkotaan yang padat saat akan diintervensi terkait Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tidak bisa karena keterbatasan lahan.
- Perilaku masyarakat dalam implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) masih kurang.

5. Sosial

- Rendahnya pemahaman bantuan bersyarat sehingga penerima manfaat selalu menganggap bantuan adalah rezeki dan tidak ada upaya dari individu untuk keluarga/daerah tersebut.
- SDM pendata verifikasi dan validasi yang kurang kompeten.
- Menganggap bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang masuk dalam DTKS.
- Data penerima bantuan kurang update karena proses verifikasi dan validasi data.
- Alat peraga sosialisasi yang digunakan oleh SDM pendamping terbatas dan kurang update dengan masalah kesehatan terkini.

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial

Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tegal.

Kelompok Sasaran Percepatan Penurunan Stunting dalam Strakom Perubahan Perilaku dan Sosial:

- Ibu hamil, calon pengantin, dan remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).
- Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk edukasi gizi dan konseling.
- Ibu dan pengasuh menerapkan praktik pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) sesuai anjuran.
- Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya.
- Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir.
- Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat.

Realisasi PROG/KEG Prioritas Pencegahan Stunting Intervensi Gizi Spesifik Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Bumil, Ibu Melahirkan, Bayi Serta Pelayanan Kesehatan Balita.

- Pemberian tablet Fe pada Remaja putri: 14.557 (98,70%)
- Pemeriksaan kesehatan pada Catin: 254 (100%)
- ANC pada Ibu hamil: 855 (97,94%)
- PMT Bumil KEK (susu bumil): 127 (73,41%)
- Kunjungan Rumah Bumil KEK / Anemia: 219 (93,59%)
- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil: 410 (100%)
- IMD pada bayi baru lahir: 615 (93,18%)
- Bayi 0-6 Bulan mendapat ASI Eksklusif: 467 (85,53%)

- Balita 6-23 Bulan mendapat MP ASI (Pemantauan MP-ASI dengan Protein Hewani): 3.258 (96,45%)
- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu (PMT penyuluhan posyandu dan Peningkatan kapasitas kader dalam pertumbuhan perkembangan): 208.300 kader (100%)
- Tatalaksana Gizi Buruk: 37 (77,08%)
- Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap: 1.283 (113,14%)

Intervensi Gizi Sensitif Pemberian Jaminan Kesehatan PBI-JKN

- Anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (75% dari 50% pajak rokok yang diterima):
- Dukungan Program JKN dianggarkan di Dinas Kesehatan melalui Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan pagu sebesar Rp 37.755.920.000,-
- Sumber dana JKN:
- DBH Pajak Rokok (Rp. x 37,5%) = Rp 11.255.232.449,-
- DBH CHT Rp 3.915.475.200,-
- DAU Rp 22.585.212.351,-
- Jumlah kepesertaan PBI APBD:
- Januari: 78.813
- Februari: 78.946
- Maret: 79.059
- April: 78.635
- UHC: 99,20 %

Tim Pendamping Keluarga (TPK)

- Jumlah: 633 Orang
- Kelompok: 211 kelompok yang terdiri dari 3 unsur:
 - a. Tenaga Kesehatan
 - b. Kader PKK
 - c. Kader KB

Tabel 2. 28 Audit Kasus Stunting Tahap I Tahap 2024

NO	Kecamatan	Kelurahan	Auditee			
			Catin	Bumil	Bufas	Baduta
1	Tegal Timur	Mintaragen	1	0	0	0
		Panggung	1	2	0	1
2	Margadana	Margadana	0	0	1	1
		Sumur Panggang	0	1	0	1
		Kalinyamat Kulon	0	1	1	0
TOTAL			2	4	2	3

Tabel tersebut menampilkan data distribusi auditee (peserta audit) di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terdiri dari beberapa kelurahan. Auditee dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu catin (calon pengantin), bumil (ibu hamil), bufas (ibu nifas), dan baduta (bayi di bawah dua tahun).

Pada Kecamatan Tegal Timur, terdapat dua kelurahan yang tercatat, yaitu Mintaragen dan Panggung. Di Kelurahan Mintaragen, hanya terdapat 1 catin dan tidak ada peserta dalam kategori lainnya. Sedangkan di Kelurahan Panggung, terdapat 1 catin, 2 bumil, dan 1 baduta, tanpa bufas yang terdaftar.

Di Kecamatan Margadana, terdapat tiga kelurahan yang tercatat, yaitu Margadana, Sumur Panggang, dan Kalinyamat Kulon. Di Kelurahan Margadana, tidak ada catin atau bumil, namun terdapat 1 bufas dan 1 baduta. Di Kelurahan Sumur Panggang, tercatat 1 catin dan 1 bufas, namun tidak ada bumil atau baduta. Sementara di Kelurahan Kalinyamat Kulon, tercatat 1 bumil dan 1 baduta tanpa peserta dalam kategori lainnya.

Secara keseluruhan, jumlah total auditee untuk kategori catin adalah 2 orang, bumil sebanyak 4 orang, bufas sebanyak 2 orang, dan baduta sebanyak 3 orang. Data ini menunjukkan distribusi auditee yang berbeda-beda di tiap kelurahan dan kategori. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan distribusi.

Fasilitas KPM/Parenting/KIE KB

- Parenting PAUD: Rp. 137.083.950,-
- Audit Kasus Stunting: Rp. 15.713.000,-
- Pelayanan KB: Rp. 208.890.000,-
- Tim Pendamping Keluarga (TPK): Rp. 125.950.000,-

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah: 2 unit RTLH dari TJSLP Perumda Tirta Bahari (PDAM) Kota Tegal
Rp. 20 Juta

Layanan Air Minum & Sanitasi

Anggaran: Rp. 118.125.000,- untuk sosialisasi, pelatihan dan honor TFL.

Praktik Baik Penanganan Stunting

Balur Canting (bantuan telur cegah stunting): DPPKBP2PA dan IePKB memberikan 2 telur/hari selama 3 bulan kepada 56 sasaran (ibu hamil KEK dan baduta/balita) stunting di 4 kecamatan.

Kegiatan yang Akan Dilaksanakan :

- 1) Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri.
- 2) Skinning anemia remaja putri untuk siswa baru.
- 3) Pelaksanaan ANC Bumil.
- 4) Kelas Ibu Hamil.
- 5) Pemantauan Pertumbuhan & Perkembangan di Posyandu.

- 6) PMT Pemulihan (PMT Lokal) untuk bumil KEK dan Balita bermasalah gizi (stunted, wasted, underweight, weight faltering).
- 7) Sosialisasi PMBA.
- 8) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, 5 unit RTLH dari TJSLP Bank Jateng Kota Tegal @ Rp. 20 Juta.
- 9) BKB Kit.
- 10) Operasional pendampingan asaran catin, keluarga berisiko, dan balita stunting.
- 11) Operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan asaran berisiko.
- 12) Koordinasi TPPS Tk. Kota.
- 13) Mini lokakarya Kecamatan.
- 14) Audit Kasus Stunting.
- 15) Layanan air minum dan sanitasi, Air Minum Perpipaan & SPALD-S DAK Sanitasi.
- 16) Gemaikan.
- 17) Gerimismatik.
- 18) Pembinaan P2L.

Tabel 2. 29 Wilayah Binaan Percepatan Penurunan Stunting

No.	Perangkat Daerah	Lokasi Sasaran
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Kel. Slerok
2.	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kel. Kejambon
3.	Dinas Perhubungan	Kel. Mintaragen
4.	Asisten Sekda dan Staf Ahli	Kel. Mangkukusuman
5.	Dinas Sosial	Kel. Kraton
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kel. Tegalsari
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kel. Pesurungan Kidul
8.	Inspektorat Daerah	Kel. Pekauman
9.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kel. Muarareja
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kel. Debong Lor
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kel. Kemandungan
12.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kel. Debong Kulon
13.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Kel. Kalinayamat Wetan
14.	Badan Keuangan Daerah	Kel. Bandung
15.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kel. Debong Kidul
16.	Dinas Lingkungan Hidup	Kel. Debong Tengah
17.	RSUD Kardinah	Kel. Randugunting

No.	Perangkat Daerah	Lokasi Sasaran
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kel. Keturen
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kel. Tunon
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan	Kel. Pesurungan Lor
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan	Kel. Krandon
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kel. Kalinyamat Kulon
23.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Margadana
24.	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Kel. Sumurpanggang
25.	Dinas Kesehatan	Kel. Kaligangsa
26.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kel. Cabawan
27.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	RW 01 dan RW 02 Kel. Panggung
28.	Bagian Perekonomian Setda	RW 03 Kel. Panggung
29.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan Setda	RW 04 dan RW 05 Kel. Panggung
30.	Bagian Umum Setda	RW 06 dan RW 07 Kel. Panggung
31.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	RW 08 dan RW 09 Kel. Panggung
32.	Bagian Pemerintahan Setda	RW 10 dan RW 11 Kel. Panggung
33.	Bagian Organisasi Setda	RW 12 Kel. Panggung
34.	Bagian Hukum Setda	RW 13 dan RW 14 Kel. Panggung

Berbagai Perangkat Daerah memiliki lokasi sasaran di sejumlah kelurahan yang tersebar di wilayah tertentu. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bertugas di Kelurahan Slerok, sementara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berfokus di Kelurahan Kejambon. Dinas Perhubungan ditempatkan di Kelurahan Mintaragen, dan Asisten Sekda serta Staf Ahli menangani Kelurahan Mangkukusuman. Di Kelurahan Kraton, Dinas Sosial melaksanakan tugasnya, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab di Kelurahan Tegalsari. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beroperasi di Kelurahan Pesurungan Kidul, dan Inspektorat Daerah berada di Kelurahan Pekauman. Beberapa Perangkat Daerah lainnya, seperti Sekretariat DPRD , Diskominfo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Lingkungan Hidup, masing-masing memiliki lokasi tugas di kelurahan yang berbeda, termasuk Muarareja, Debong Lor, Kemandungan, dan Debong Tengah. Setiap Perangkat Daerah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi mereka di kelurahan masing-masing, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif.

Komitmen Tindak Lanjut:

- 1) Meningkatkan kualitas data master dan komitmen lintas sektor untuk menggunakan hasil analisis situasi sebagai rujukan dalam perencanaan program/kegiatan dan pelaksanaan intervensi.
- 2) Meningkatkan edukasi kepada sasaran dan implementasi strategi komunikasi dan perubahan perilaku harus dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat dalam pencegahan kasus stunting baru.
- 3) Pelaksanaan rembuk stunting secara tepat waktu, yaitu sebelum penyelenggaraan musrenbang kabupaten/kota dengan substansi sesuai yang ditentukan dalam petunjuk teknis.
- 4) Penguatan peran pemerintah kecamatan untuk mengarahkan desa/kelurahan dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan kebutuhan di wilayahnya.
- 5) Melaksanakan intervensi serentak sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas para pelaku sesuai arahan Pemerintah Pusat.
- 6) Identifikasi sasaran audit (kasus stunting) berdasarkan hasil kesepakatan dalam mini lokakarya, serta melaksanakan pemantauan atas kesinambungan tindak lanjut hasil rekomendasi audit kasus stunting.
- 7) Melaksanakan pengukuran dan penimbangan secara rutin setiap bulan dengan tingkat keterisian pada e-PPGBM di atas 90%, serta memastikan kualitas pengukuran dan penimbangan yang baik.
- 8) Kegiatan yang diidentifikasi sebagai praktik baik dilakukan dalam waktu yang memadai, dipantau perubahan dampaknya, serta didokumentasikan dalam bentuk pedoman untuk meningkatkan keberlanjutan dan peluang replikasi.
- 9) Memperkuat fungsi kelitbangan melalui kerjasama dengan akademisi maupun lembaga non-pemerintah yang dapat melakukan fungsi kelitbangan guna mengetahui karakteristik yang menjadi determinan kasus stunting di wilayah masing-masing dan opsi penanggulangannya.

II.3 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Tegal 2024

II.3.1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kota Tegal terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan dengan total penduduk sebesar 287.959 jiwa (BPS). Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis terletak pada 109° 04'28" sampai 109°09'41" Bujur Timur dan 06°50'21" sampai 06°54'00" Lintang Selatan. Kota Tegal di sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal, sebelah timur berbatasan langsung dengan tiga kabupaten : sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Tegal dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Adapun di sebelah utara Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Kota Tegal memiliki ketinggian dari permukaan laut ±3 meter, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat.

Topografi wilayah ini merupakan hulu sungai ke Laut Jawa. Tidak ada satupun kelurahan yang berada di lereng / bukit maupun lembah. Rata-rata suhu udara di Kota Tegal pada tahun 2023 sebesar 28,1°C. Dengan rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 24,0oC, sedangkan rata – rata suhu udara tertinggi mencapai 24,9oC yang terjadi pada bulan Nopember .

Kelembaban udara di Kota Tegal pada tahun 2023 berkisar antara 61 persen hingga 91 persen, dengan curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi sebanyak 304,2 mm3 terjadi pada bulan Januari dengan hari hujan sebanyak 21 hari. Adapun bulan Oktober dan September merupakan bulan dengan curah hujan terendah dengan tidak ada hari hujan.

Sedangkan rata-rata persentase penyinaran matahari Kota Tegal Tahun 2023 adalah 81%. Dengan rata-rata penyinaran matahari terendah pada bulan Februari sebesar 38% dan yang tertinggi pada bulan September dan Oktober sebesar 99%. Pada bulan dengan curah hujan tinggi, persentase penyinaran matahari cenderung rendah, sedangkan pada bulan dengan curah hujan rendah persentase penyinaran matahari cenderung tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tegal pada tahun 2023 mencapai 5,01 persen. Kategori informasi dan komunikasi tumbuh paling cepat diantara kategori lainnya.

Tiga besar kategori usaha dengan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kota Tegal masih dipegang oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; dan industri pengolahan dengan kontribusi masing – masing sebesar 25,22 persen; 18,35 persen; dan 16,14 persen.

Sejalan dengan nilai inflasi Kota Tegal tahun 2023 sebesar 3,28 persen, laju indeks implisit PDRB Kota Tegal Tahun 2023 berada pada kisaran 3,21 persen. Laju indeks implisit yang masih lebih kecil dari inflasi menunjukkan bahwa terjadi kenaikan proporsi pada besaran pajak atau margin perdagangan komoditas yang diproduksi di Kota Tegal.

Dari sisi pengeluaran, pada tahun 2023 pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Kota Tegal, masing-masing sebesar 51,59 persen dan 43,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian di Kota Tegal sebagian besar dikonsumsi untuk keperluan rumah tangga dan pembentukan barang modal usaha.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program

berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme* (WFP). Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kota dengan analisis sampai tingkat kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran di wilayah kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kota Tegal tahun 2024.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kelurahan.

Pengembangan FSVA tingkat kelurahan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

B. Kerangka Konsep Ketahanan dan Gizi

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan

budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal food security yang dihasilkan oleh World Food Summit tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya nutrition security yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai Food and Nutrition Security. Pada tahun 2012 FAO mengajukan definisi food security menjadi food and nutrition security untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan *upaya Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik.

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi. Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

C. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator proxy ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan

pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten/kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk	BPS 2023; Pusat Data Informasi Kementan2022; Dinas Pertanian 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023. Sumber data resmi lain.
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga	Potensi Desa (Podes) BPS 2021; Dinas Perdagangan 2023; Sensus Penduduk 2020 (Proyeksi) BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023. Sumber data resmi lain.
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
		2023, Sumber data resmi lain
Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Kelurahan yang tidak memiliki aksespenghubung memadai dengankriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidakdapat dilalui sepanjang tahun; (2) Kelurahan dengan sarana transportasi air atau udaranamun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa (Podes) 2022, Dinas Pekerjaan Umum 2023, Dinas Perhubungan 2023, Sumber data resmi lain
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga	BAPPEDA 2023, Dinas Kesehatan 2023, P3KE 2023, Sensus Penduduk 2020 (Proyeksi) BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023, Sumber data resmi lain
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Dinas Kesehatan 2023, Sensus Penduduk 2020 (proyeksi) BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023, Sumber data resmi lain

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam penyusunan Global Food Security Index (EIU 2016 dan 2017) dan International Food Policy Research Institute (IFPRI) dalam penyusunan Gobal Hunger Index (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:
Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
a_i : Bobot masing-masing indikator
X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:
K_j : *cut off point* komposit ke-J
a_i : Bobot indikator ke-i
C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-l kelompok ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 2. 31 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kab	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
Sub Total		1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6	1/6
4.	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air ata udara	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

- c. Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan cut off point komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point komposit. Cut off point komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100).
- d. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

II.3.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,

mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar/distributor sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

A. Produksi

Pemerintah Kota Tegal telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 5,15% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tegal pada tahun 2023. Padi merupakan bahan pokok di Kota Tegal yang menyumbang total produksi sereal kota. Berdasarkan Tabel 2.32 dan Gambar 2.8, Produksi padi mengalami penurunan selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 2.560 ton tahun 2019 menjadi 2.239 ton pada tahun 2023.

Tabel 2. 32 Produksi Padi 2019-2023 (Ton)

Sereal	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata 5 tahun
Padi	2.564	2.490	1.920	2.283	2.239	2.299
Jagung	-	-	-	-	-	-
Ubi Kayu	-	-	-	-	-	-
Ubi Jalar	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka 2019-2023, BPS

Gambar 2. 8 Produksi Padi Kota Tegal Tahun 2019-2023



Total produksi padi dan laju pertumbuhan produksi tahun 2019-2023 menunjukkan laju pertumbuhan sebesar -3,33% per tahun, yaitu dari total produksi tahun 2019 sebesar 2.564 ton menjadi 2.239 ton pada tahun 2023. Sebaran total produksi padi selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 2.564 ton dan terkecil pada tahun 2021. Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir (2019-2023) telah dianalisis dan disajikan.

Gambar 2. 9 Grafik Produksi Padi Tiap Kecamatan 2019-2023

Kecamatan	Produksi Padi					Laju Pertumbuhan 2019 – 2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Tegal Selatan	355,1	498	518,4	527	527	10,37%
2. Tegal Timur	155,9	162	211,2	175	175	2,95%
3. Tegal Barat	190	198	153,6	235	235	5,45%
4. Margadana	1.863	1.632	1036,8	1346	1302	-8,56%



B. Sarana dan prasarana Ekonomi

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, distributor, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut. Dari 27 kelurahan di Kota Tegal, 5 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (18,52%), 6 kelurahan prioritas 2 (22,22 %) dan 4 kelurahan prioritas 3 (14,81%).

Tabel 2. 34 Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas

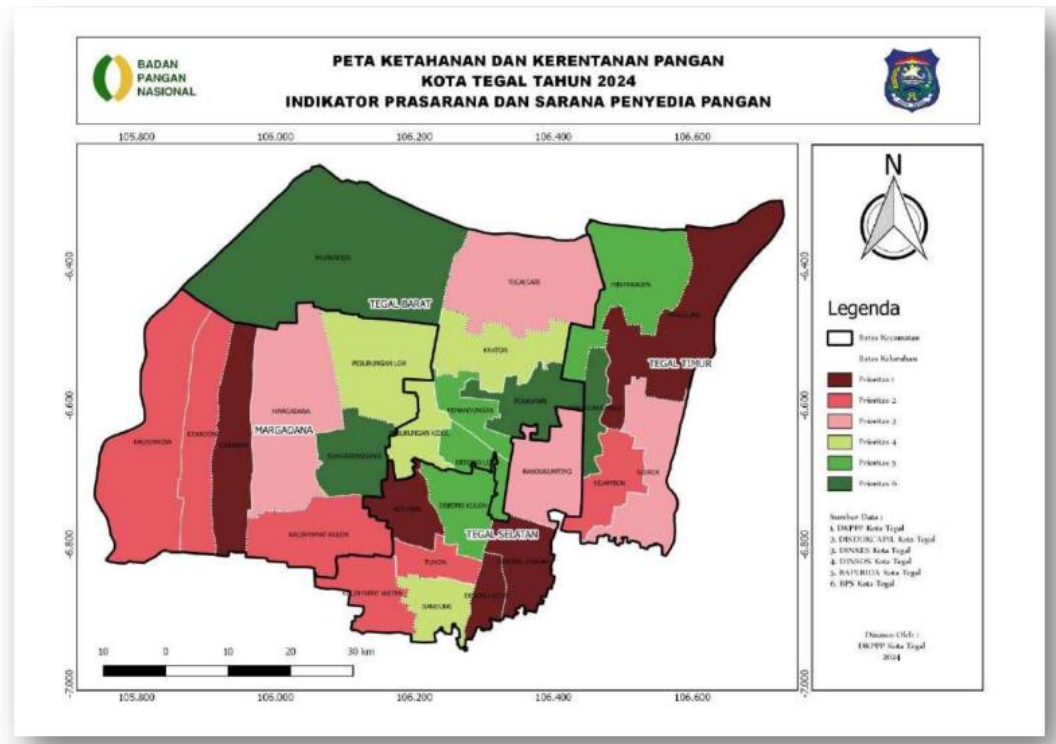
No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	Prioritas 1	$\leq 0,0146$	5	18,51%
2	Prioritas 2	$> 0,0146 - 0,0161$	6	22,22%
3	Prioritas 3	$> 0,0161 - 0,0202$	4	14,81%
4	Prioritas 4	$> 0,0202 - 0,0264$	4	14,81%
5	Prioritas 5	$> 0,0264 - 0,0352$	4	14,81%
6	Prioritas 6	$\geq 0,0352$	4	14,81%

Gambar 2. 10 Grafik Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi

SEBARAN RASIO SARANA PRASARANA EKONOMI



Gambar 2. 11 Peta Rasio Jumlah Sarana Prasarana Penyedia Pangan



C. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Tegal dari tahun 2019-2023 mencapai 4,17% per tahun sementara pertumbuhan produksi padi mencapai -3,33% per tahun. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total di Kota Tegal adalah sebesar 0,07. Sementara itu laju konversi lahan sebesar 105,12 Ha. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 55,54%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Bahwa kondisi ini menggambarkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk, Kota Tegal tidak dapat memenuhi kebutuhan beras secara mandiri. Dalam mengatasi permasalahan ini, terdapat potensi pasar beras Kota Tegal yang bekerja sama dengan bulog sebagai pusat penjualan beras dari berbagai daerah luar Kota Tegal. sehingga diharapkan dapat terpenuhi dengan keberadaan pasar beras tersebut.

Ketersediaan Pangan di Kota Tegal dipenuhi dari tiga sumber yaitu, produksi bahan pangan di Kota Tegal, pasokan pangan dari luar Kota Tegal, dan

cadangan pangan masyarakat. Dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi ketersediaan pangan utama. Penurunan luas panen padi sawah serta produktivitas lahan sawah semakin berkurang serta serangan organisme pengganggu tanaman dengan intensitas ringan sampai sedang.

Kebijakan kota mengenai ketersediaan pangan pada periode tahun 2019 - 2024 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) intensifikasi lahan pertanian; (iii) mengurangi dampak iklim terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

(i) Peningkatan produktivitas

- a. Perbaikan penggunaan varietas tanaman / pergiliran varietas
- b. Pemupukan berimbang, dan penggunaan pupuk organik maupun kimia
- c. Pengelolaan air irigasi yang tepat
- d. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
- e. Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan pemanfaatan teknologi Pertanian
- f. Melakukan proteksi lahan pertanian melalui sawah lestari
- g. Revitalisasi lahan terintrusi air laut

D. Strategi Untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan

(ii) Intensifikasi lahan pertanian

- a. Peningkatan kesuburan lahan Pertanian
- b. Optimalisasi penggunaan lahan dengan pola tanam yang tepat
- c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Usaha Tani (JUT)
- d. Pembangunan sumur pompa/ pompanisasi
- e. Optimalisasi lahan pekarangan melalui kegiatan P2L (Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari)

(iii) Pengurangan dampak Iklim terkait resiko

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara terpadu
- b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen

(iv) Penguatan kelembagaan bagi petani

- a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
- b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
- c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- d. Pemasaran produk pertanian, misal promosi produk pertanian, peternakan, perikanan di tingkat kota maupun provinsi.
- e. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

II.3.3 Akses Pangan

A. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kota Tegal. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Tegal mengalami penurunan dalam kurun waktu 2021 – 2023 yaitu dari 8,12% (20.270 orang) di tahun 2021 menjadi 7,68% (19.220 orang) pada tahun 2023.

Tabel 2. 35 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Tegal

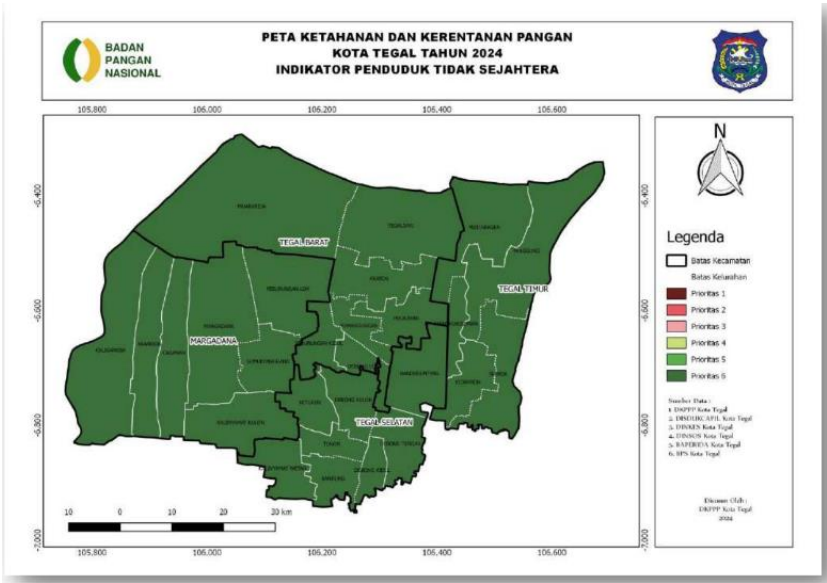
Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin	7,47	7,80	8,12	7,91	7,68

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2023, tidak terdapat kelurahan yang masuk dalam prioritas 1 – 3, semua kelurahan masuk dalam prioritas 6.

Tabel 2. 36 Sebaran Kelurahan dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Priotitas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	$\geq 0,1151$	0	0%
2	$0,0977 - < 0,1151$	0	0%
3	$0,0829 - < 0,0977$	0	0%
4	$0,0744 - < 0,0829$	0	0%
5	$0,0650 - < 0,0744$	0	0%
6	$< 0,0650$	27	100%

Gambar 2. 12 Peta Rasio Jumlah Penduduk Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk



B. Akses Transportasi

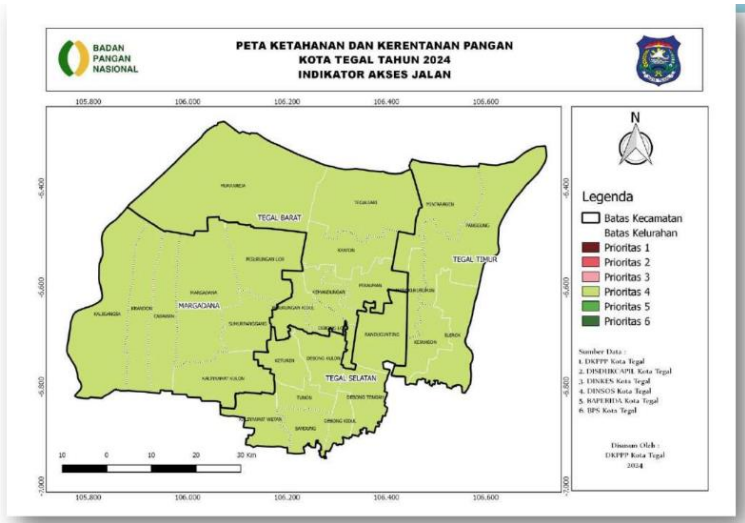
Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (farm gate price) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Jalan merupakan modal transportasi utama di Kota Tegal. Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021, BPS, di Kota Tegal, semua kelurahan memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

Gambar 2. 13 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Tegal Tahun 2024
Indikator Akses Jalan



C. Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kota Tegal untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2019 - 2024 diantaranya:

- a. Melaksanakan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif dengan pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara pemberdayaan dan penguatan usaha mikro kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan, peningkatan peluang usaha penduduk miskin, peningkatan kualitas masyarakat miskin serta peningkatan akses kesempatan kerja khususnya bagi penduduk miskin.
- c. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar difokuskan kepada perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi.
- d. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin
- e. Mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin (pendidikan, kesehatan, pangan dan sandang)
- f. Pemberian bantuan biaya hidup dan bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar
- g. Meningkatkan nilai santunan kematian bagi keluarga miskin · Pemberian bantuan berupa uang tunggu pasien bagi keluarga tidak mampu melalui bansos

II.3.4 Pemanfaatan Pangan

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kota, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

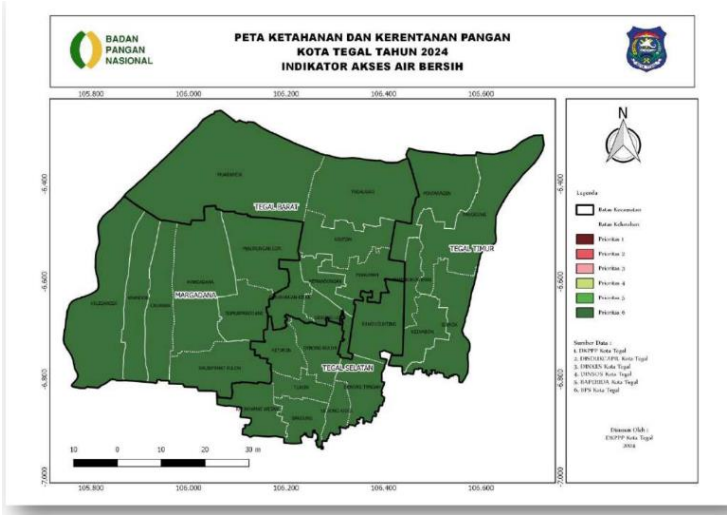
A. Akses Terhadap Akses Air Bersih

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil (kelompok rumah tangga berjumlah 10) 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 2. 37 Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas.

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	$\geq 0,0121$	0	0%
2	$0,0041 < 0,0121$	0	0%
3	$0,0018 < 0,0041$	0	0%
4	$0,0009 < 0,0018$	0	0%
5	$0,0005 < 0,0009$	0	0%
6	$< 0,0005$	27	100%

Gambar 2. 14 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Tegal Tahun 2024 Indikator Akses Air Bersih



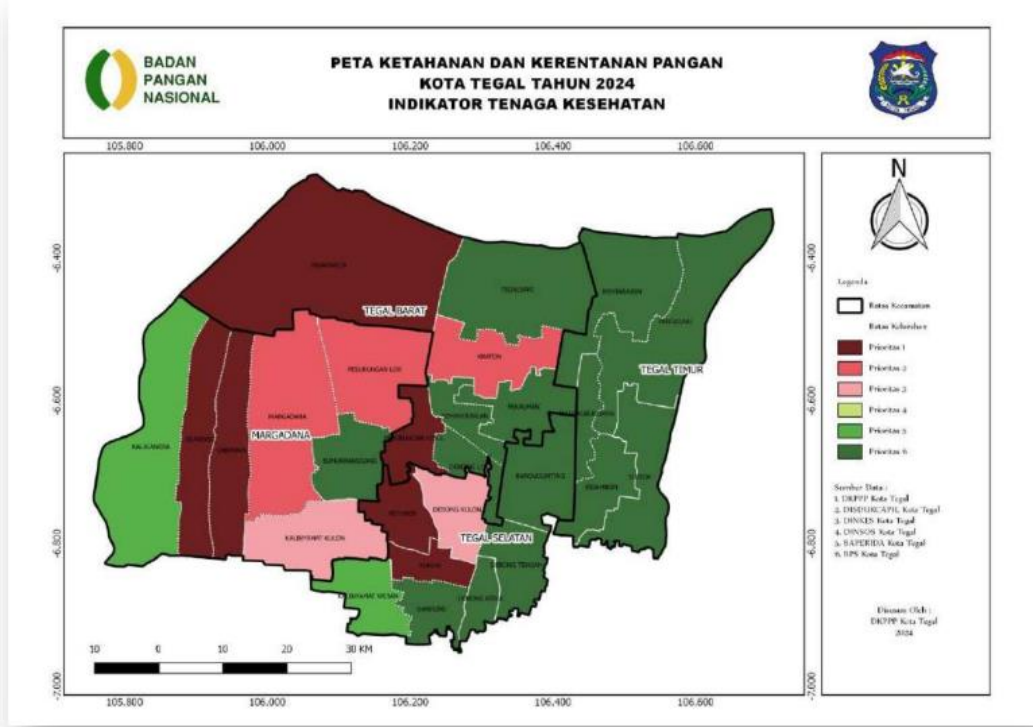
B. Akses Tenaga Kesehatan

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 2. 38 Sebaran rasio tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	$\geq 0,8522$	6	22,22%
2	$0,2298 < 0,8522$	3	11,11%
3	$0,1179 < 0,2298$	2	7,41%
4	$0,0998 < 0,1179$	0	0%
5	$0,0449 < 0,0998$	2	7,41%
6	$< 0,0449$	14	51,85%

Gambar 2. 15 Peta Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan



C. Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight [berat badan berdasarkan umur (BB/U)] dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan darikurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah balita stunting di Kota Tegal pada tahun 2023 sebesar 8,86% dari jumlah keseluruhan balita, atau sebanyak 978 dari 11.036 balita di Kota Tegal. Kecamatan Tegal Timur merupakan daerah yang paling banyak yaitu 303 anak, disusul Kecamatan Tegal Selatan ada 250 anak, Kecamatan Tegal Barat sebanyak 243 anak, dan Kecamatan Margadana sebanyak 182 anak.

Sedangkan jumlah penderita gizi buruk di Kota Tegal pada tahun 2019 - 2023 sebanyak 145 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Tegal Timur sebanyak 77 balita disusul Kecamatan Tegal Selatan sebanyak 34 balita, Kecamatan Tegal Barat 26 balita dan terendah di Kecamatan Margadana sebanyak 8 balita.

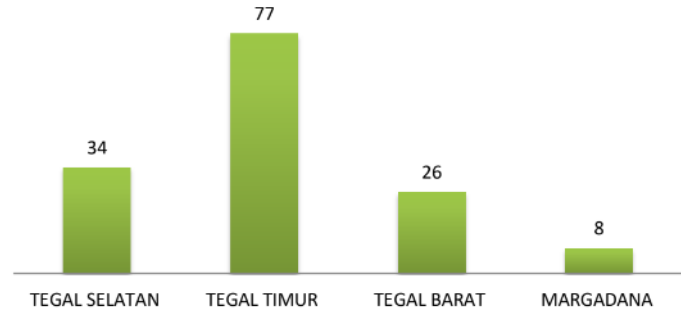
Gambar 2. 16 Grafik Penderita Stunting



Tabel 2. 39 Penderita Gizi Buruk 2019-2023

No .	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tegal Selatan	7	6	10	3	8	34
2	Tegal Timur	15	25	19	11	7	77
3	Tegal Barat	4	8	3	6	5	26
4	Margadana	0	0	3	3	2	8
	Total	26	39	28	23	22	145

Gambar 2. 17 Jumlah penderita Gizi Buruk 2019-2023



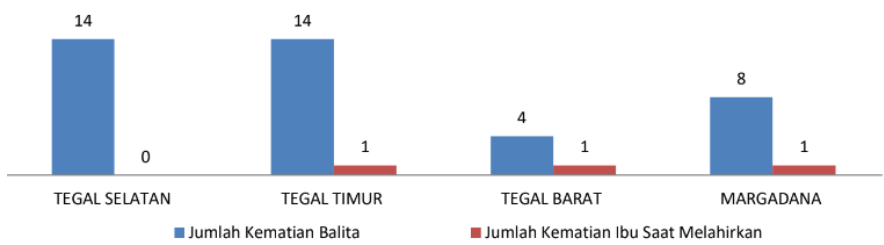
Tabel 2. 40 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Tegal Selatan	14	0	14
2	Tegal Timur	14	1	15
3	Tegal Barat	4	1	5
4	Margadana	8	1	9
	Total	40	3	43

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kota Tegal tahun 2023

sebesar 40 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kota Tegal 3 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur masing-masing sebanyak 14 balita, kemudian Kecamatan Margadana 8 balita dan terendah Kecamatan Tegal Barat sebanyak 4 orang. Angka kematian ibu saat melahirkan terdapat pada Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Margadana masing-masing sebanyak 1 jiwa.

Gambar 2. 18 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan Per Kecamatan



D. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan

sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya dirawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani), sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan). Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multisektoral.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisiasi menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.

- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian tablet besi atau tablet tambah darah untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
 - Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

Sedangkan strategi Kota Tegal untuk mempercepat mengatasi hal ini yaitu dengan kebijakan Percepatan Perbaikan Gizi yang mengacu pada:

- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Perbaikan Gizi
 - 1) Penurunan Stunting fokus 1000 hari pertama kehidupan
 - 2) Pendekatan Multisektor
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - 1) Aktifitas fisik
 - 2) Konsumsi makanan sehat
 - 3) Deteksi dini
 - 4) Lingkungan sehat
 - 5) Pendidikan Kesehatan
 - 6) Pola hidup sehat
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan Strategi Pangan dan Gizi
 - 1) Ketersediaan Pangan
 - 2) Keterjangkauan Pangan
 - 3) Pemanfaatan pangan

- 4) Pebaikan Gizi Masyarakat
- 5) Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

II.4 Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tegal dalam pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi dan pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang dan Aman. Tantangan yang dihadapi adalah:
 - 1) Meningkatkan produksi komoditas bahan pangan di Kota Tegal
 - 2) Mengurangi tingkat ketergantungan Kota Tegal terhadap supply bahan pangan dari daerah lain
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
 - 4) Peningkatan ketrampilan pelaku pertanian, peternakan dan perikanan
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman. Tantangan yang dihadapi adalah:
 - 1) Meningkatkan daya beli masyarakat
 - 2) Memperkuat intervensi program permasalahan gizi
 - 3) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 4) Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam
 - 5) Penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat
 - 6) Penguatan kemandirian Pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana.
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial) Tantangan yang dihadapi adalah:
 - 1) Memperkuat intervensi program permasalahan gizi
 - 2) Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)
 - 3) Menjamin mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat
 - 4) Meningkatkan KIE pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
 - 5) Meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat
4. Penguatan Kelembagaan dan tata Kelola Pangan dan Gizi. Tantangan yang dihadapi adalah:
 - 1) Memperkuat koordinasi lintas sector dalam pelaksanaan RAD-PG
 - 2) Meningkatkan keterlibatan sector non pemerintah dalam pembangunan pangan dan gizi
 - 3) Memperkuat kapasitas dan kualitas pelaksana program dalam penyelenggaraan RAD-PG
 - 4) Mengintegrasikan RAD-PG dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting

Salah satu pendekatan penting dalam menyusun kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi adalah pendekatan PUG. Sebut saja dalam permasalahan Gizi-lebih bahwa persoalan gender tampaknya menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia. Prevalensi obesitas pada perempuan lebih tinggi daripada pada laki-laki, sebagaimana ditunjukkan Riskesdas 2018, 29,3% perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas dibandingkan 14,5% laki-laki dewasa).

Di dalam Global Nutrition Report 2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan outcome gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut memengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagi mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD.

Di Indonesia, pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang ini juga mengamanatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan demikian diperlukan pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

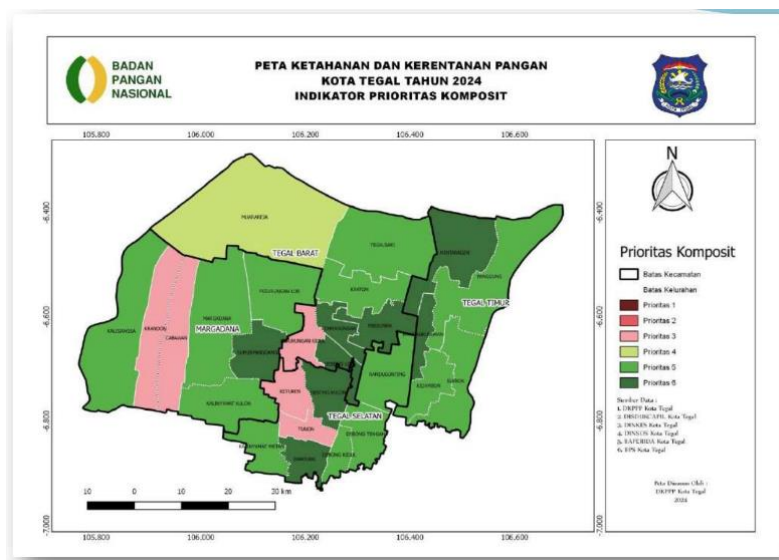
Selain itu, Pandemi telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya percepatan perbaikan gizi. Diperlukan strategi-strategi baru untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun.

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat risiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 27 kelurahan yang ada di Kota Tegal maka didapatkan 0 kelurahan (Prioritas 1), 0 kelurahan (Prioritas 2), 5 kelurahan (Prioritas 3), 1 kelurahan (Prioritas 4), 13 kelurahan (Prioritas 5) dan 8 kelurahan (Prioritas 6).

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0	0%
2	0	0%
3	5	18,52%
4	1	3,70%
5	13	48,15%
6	8	29,63%

Gambar 2. 19 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan



Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Selatan (2 Kelurahan yaitu Tunon dan Keturen); Kecamatan Margadana (2 Kelurahan yaitu Krandon dan Cabawan); dan Kecamatan Tegal Barat (1 Kelurahan yaitu Pesurungan Kidul).

Gambar 2. 20 Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 3 Per Kecamatan



Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 di Kecamatan Tegal Selatan (Kelurahan Kuturen dan Kelurahan Tunon) dan Kecamatan Margadana (Kelurahan Cabawan dan Kelurahan Krandon) disebabkan oleh : (1) sarana dan prasarana penyedia pangan dan (2) jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sedangkan kelurahan yang ada di Kecamatan Tegal Barat (Kelurahan Pesurung Kidul) disebabkan oleh : (1) akses tenaga kesehatan.

II.5 Rekomendasi Kebijakan

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (kelurahan), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kelurahan diprioritaskan pada:

- Kelurahan-kelurahan prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Barat
- Kelurahan-kelurahan yang lokasinya berbatasan dengan kabupaten lain
- Kelurahan-kelurahan pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kelurahan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 2. 21 Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



BAB III
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

III.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama dari penyusunan RAD Pangan dan Gizi adalah untuk mendukung peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kota Tegal. Oleh karena itu merujuk pada RAN Pangan dan Gizi, rumusan tujuan dari penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi Kota Tegal melalui koordinasi program, kegiatan dan sub kegiatan multisektor;
- 2) Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah Kota Tegal serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
- 3) Memberikan panduan dan masukan bagi organisasi perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

Sasaran utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal adalah Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Adapun indikator-indikator yang menjadi tolok ukur pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal meliputi:

Gambar 3. 1 Indikator dan Target Kinerja Sasaran RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2018	2019	2020	2021	2023	2023
1.	Ketersediaan Pangan Utama	%	93	95,32	95,38	95,3	100	100
2.	Angka Kecukupan Energi perkapita (AKE)	kkal/kapita /hari	2.286	1.995	2.147	2.100	1.926	2.146
3.	Angka Kecukupan Protein perkapita (AKP)	gram/ kapita/ hari	70,37	58,3	66,2	69,2	60,2	67,6
4.	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Produk Segar Asal Tumbuhan	%	100	99,68	100	99,8	96,69	100
5.	Persentase ketersediaan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	-	-	-	83,72	92,8	88,65
6.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	89,36	84,00	86,60	88,90	87,00	94,00
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	67,18	80,18	76,74	78,39	75,71	73,43

No	Indikator Sasaran RAD Pangan dan Gizi	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Ketersediaan Beras (ton)	40.434	40.836	41.223	41.597	41.955
2.	Ketersediaan Protein Hewani (ton)	5.182	5.700	6.270	6.897	7.587
3.	Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	-	-	-	-	-
4.	Peningkatan Produksi Sayuran (%)	-	-	-	-	-
5.	Skor Pola Pangan Harapan	95,5	96,4	97,3	97,8	98,2
6.	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.147,40	2.148,00	2.148,50	2.149,00	2.150,00
7.	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	67,6	67,7	67,7	67,8	67,9
8.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	6,79	6,54	6,29	6,04	5,79
9.	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	-	-	-	-	-
10.	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	12,4	12,3	12,2	12,1	12
11.	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	10,2	10,1	10,1	10,1	10
12.	Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	-	-	-	-	-
13.	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	218,7	217	215,4	213,7	210,4
14.	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	100	100	100	100	100
15.	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	-	-	-	-	-
16.	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	-	-	-	-	-
17.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,8	20,8	16,7	12,5	8,71
18.	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	9,5	8,6	7,7	6,8	5,9
19.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2

Tujuan Strategis

Tujuan strategis adalah sasaran yang dikembangkan dengan spesifikasi yang lebih besar aspek ketahanan pangan dan gizi yang hendak dicapai. Tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial);
- 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

1. Strategi adalah pendekatan menyeluruh berupa rencana cermat ketahanan pangan dan gizi. Strategi mengacu kepada RAN-PG dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah, sebagaimana tertera pada Lampiran 1.
2. Aksi adalah penjabaran strategi untuk menajamkan kegiatan yang ada di bidang pangan dan gizi. Aksi mengacu kepada RAN-PG dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah, sebagaimana tertera pada Lampiran 1.
3. Keluaran Aksi/indikator kinerja adalah adalah hasil yang hendak dicapai dari aksi/kegiatan. Keluaran aksi/indikator kinerja mengacu kepada rincian belanja sub kegiatan pada bagian “keluaran dan hasil” yang akan diinput ke dalam SIPD Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adapun komposisi pemangku kepentingan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pokja Ketersediaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah. Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; sosial; perindustrian dan usaha kecil menengah; pengawasan obat dan makanan; pemberdayaan masyarakat desa; kependudukan dan KB; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang pertanian.
2. Pokja Keterjangkauan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan. Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; kependudukan dan KB; sosial; penanggulangan bencana; perdagangan; BULOG; perbuhungan; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang ketahanan pangan.

3. Pokja Pemanfaatan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.

III.2 Ruang Lingkup

RAD-PG difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam RAN-PG, RPJMN 2025-2029, RPD Kota Tegal, serta dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2025-2029 serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu:

- 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial);
- 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor ditingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip *no one left behind* dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025-2029 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi masa transisi.

III.3 Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Beberapa penguatan dalam rencana aksi pangan dan gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPD Kota Tegal. Selain itu rencana aksi telah menggunakan pendekatan kesetaraan gender dalam menyusun aksi serta mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi ke gawat darurat.

III.4 Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah Dalam Situasi Darurat

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Respon kebijakan pangan dan gizi di daerah dalam situasi darurat merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebijakan ini menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan bahan makanan yang memiliki nilai gizi

tinggi secara merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kecukupan gizi, yang mencakup upaya untuk menyediakan bahan pangan bergizi dan memastikan distribusinya yang adil di seluruh wilayah, termasuk dalam kondisi darurat seperti bencana alam, konflik, atau pandemi.

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan dengan tegas bahwa pemerintah wajib memenuhi kecukupan gizi masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan pangan yang tidak hanya cukup secara kuantitatif tetapi juga berkualitas dari segi nilai gizi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak proaktif dalam menjaga kesejahteraan gizi masyarakat, terutama dalam situasi darurat di mana akses terhadap pangan seringkali terganggu.

Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau pandemi, distribusi pangan dapat menjadi tantangan tersendiri. Akses terhadap pangan mungkin terbatas akibat terganggunya rantai pasokan, infrastruktur yang rusak, atau hambatan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki rencana kontingensi yang komprehensif, termasuk penyediaan cadangan pangan, pengelolaan logistik yang efisien, dan distribusi yang tepat sasaran. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam menyelenggarakan program bantuan pangan dan gizi yang efektif.

Kebijakan pangan dan gizi dalam situasi darurat juga harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, yang memiliki kebutuhan gizi khusus. Program-program seperti pemberian makanan tambahan, distribusi vitamin, dan edukasi gizi menjadi krusial dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok ini mendapatkan asupan gizi yang memadai. Dengan demikian, respons kebijakan pangan dan gizi di daerah dalam situasi darurat tidak hanya berfokus pada kelangsungan hidup, tetapi juga pada kualitas hidup yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

III.5 Pengarusutamaan Gender dalam Rad-PG

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam Global Nutrition Report 2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi.

Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Sub kegiatan yang berkaitan dengan gender tertentu telah dimasukkan dalam matriks rencana aksi dan beberapa indikator akan diukur dan dipilah berdasarkan jenis kelamin jika relevan.

Dengan demikian, intervensi gizi yang disusun baik spesifik maupun sensitive diharapkan mampu merespon secara tepat berbagai perbedaan kebutuhan gizi yang timbul dari kombinasi berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta faktor geografis.

BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI

IV.1 Strategi dan Aksi

Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan *undernutritions* (stunting, *wasting*, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular. Adapun strategi dan aksi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
 - a Peningkatan produksi pangan yang beragam;
 - b Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
 - c Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - d Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*); dan
 - e Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
 - a Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - b Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan
 - c Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
 - d Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
 - e Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;
 - f Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
 - g Pengembangan sistem logistik pangan.
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
 - a Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
 - b Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;
 - c Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
 - d Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;
 - e Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;
 - f Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;
 - g Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - h Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*);
 - i Fortifikasi pada pangan tertentu; dan
 - j Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
- a Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah;
 - b Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah;
 - c Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi;
 - d Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
 - e Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi

Indikator Kerja Utama dan Strategi

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. RAN- PG disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB. Dengan demikian penting untuk menyelaraskan indikator kinerja utama rencana aksi pangan dan gizi baik di pusat maupun di daerah.

Tabel 4. 1 Indikator kinerja utama di bidang pangan dan gizi

No	Indikator Sasaran RAD Pangan dan Gizi
1.	Ketersediaan Beras (ton)
2.	Ketersediaan Protein Hewani (ton)
3.	Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)
4.	Peningkatan Produksi Sayuran (%)
5.	Skor Pola Pangan Harapan
6.	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)
7.	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)
8.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)
9.	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)
10.	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)
11.	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)
12.	Konsumsi protein asal temak (gram/kapita/hari)
13.	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)
14.	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)
15.	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)
16.	Persentase makanan memenuhi syarat (%)
17.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
18.	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)
19.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)

Indikator kinerja utama di bidang pangan dan gizi seperti pada Tabel telah tercantum dalam RPJMN 2025-2029 dapat diacu daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Untuk mencapainya, pemerintah daerah juga dapat mengacu kepada tujuan strategis, strategi dan aksi yang telah dikembangkan di dalam RAN- PG 2025-2029 dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah masing-masing, sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Peningkatan Ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Peningkatan produksi pangan yang beragam;
 - b. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
 - c. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - d. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss); dan
 - e. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui bio-fortifikasi
2. Tujuan Strategis : Peningkatan keterjangkauan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
 - a. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
 - c. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
 - d. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
 - e. Penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;
 - f. Penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
 - g. Pengembangan sistem logistik pangan;
3. Tujuan Strategis: Peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial), dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
 - b. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiap tahun;
 - c. Edukasi pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
 - d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
 - e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
 - f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;
 - g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - h. Pengendalian pemborosan Pangan (*food waste*);
 - i. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi; dan
 - j. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu Pangan.
4. Tujuan Strategis: Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi
 - a. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan dan gizi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan;
 - b. Penguatan kemitraan antar pemangku kepentingan;
 - c. Pengendalian dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi;

- d. Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
- e. Penguatan dukungan riset dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

Strategi ketahanan pangan dan gizi di atas diharapkan mampu dijabarkan oleh pemerintah daerah sebagai referensi aksi dan tidak bersifat mutlak diacu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Rincian aksi yang merupakan penjabaran dari masing-masing strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Strategi dan Aksi Pangan dan Gizi

NO	STRATEGI	AKSI
1.	Tujuan Strategis: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan
		Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota
		Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>)	Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i>

NO	STRATEGI	AKSI
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait
		Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian <i>food loss</i>
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia
		Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan
2.	Tujuan Strategis: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system</i> (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras biofortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas BPNT/Program Sembako

NO	STRATEGI	AKSI
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah
		Mengembangkan kerjasama industri start up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur e-commerce
3.	Tujuan Strategis : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi panganekaragaman konsumsi pangan
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik

NO	STRATEGI	AKSI
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini
		Melakukan orientasi <i>agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji
		Meningkatkan sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota

NO	STRATEGI	AKSI
	hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	
		Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal; berbasis pangan lokal; berbasis pangan lokal;	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024
		Mendorong pemanfaatan RUTF (<i>Ready to Use Therapeutic Food</i>) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi
		Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan
		Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa
		Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19

NO	STRATEGI	AKSI
3.8	Pengendalian pemborosan pangan (<i>food waste</i>);	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>
		Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan imperfect
		Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan <i>food waste</i>
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food waste</i>
		Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada
		Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi
		Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan
		Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku
3.10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong ditetapkan minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru
4.	Tujuan Strategis : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting
		Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)
		Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD- PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di pusat dan daerah

NO	STRATEGI	AKSI
	ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> .
4.3	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptibilitas</i> , harga, <i>shelf live</i>) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi
4.5	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i>
		Melakukan kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro
		Mengembangkan <i>community based data</i> untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro ditingkat kabupaten/kota
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan
		Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga

NO	STRATEGI	AKSI
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar
		Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia
4.5	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i>
		Melakukan kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro
		Mengembangkan community based data untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro ditingkat kabupaten/kota
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan
		Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar
		Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia

IV.2 Pengorganisasian

Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal dilakukan dengan melibatkan banyak organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah ini akan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mendukung 4 (empat) tujuan strategis pembangunan pangan dan gizi. Peran dari masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut adalah:

1. Dinas Kesehatan berperan untuk mendorong sinkronisasi dan konvergensi seluruh perencanaan, implementasi, termasuk pemantauan dan evaluasi pada semua program yang mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
2. Dinas Sosial berperan untuk menyediakan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada kelompok-kelompok PPKS, dan juga penyediaan perlindungan dan jaminan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berhak.
3. DPPKBP2PA berperan untuk mengintegrasikan dan memastikan isu gender dalam pembangunan pangan dan gizi, menguatkan ketahanan keluarga serta penguatan program KB.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memiliki peran untuk menguatkan dan menyediakan sarana distribusi pangan, pengawasan peredaran barang berbahaya, serta pengawasan kegiatan perdagangan yang sangat mempengaruhi ketersediaan dan aksesabilitas pangan. Selain itu memiliki peran untuk menguatkan pelaku usaha mikro dan kecil bidang pangan terkait pengolahan usaha pangan yang aman dan sehat.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran untuk menjamin kondisi irigasi yang baik guna mendukung produktivitas bahan pangan.
6. DKP3 (Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan) berperan untuk menjaga dan menjamin ketersediaan bahan pangan, mengatasi permasalahan rawan pangan, menjamin keamanan dan mutu pangan.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki peran untuk menguatkan pelaku Industry bidang pangan terkait pengolahan usaha pangan yang aman dan sehat.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan dan distribusi kebutuhan pangan bagi korban bencana.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki peran untuk melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan bidang pangan dan gizi, serta menguatkan riset dan inovasi di bidang pangan dan gizi.

IV.3 Peran Sektor Non Pemerintah

Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal tahun 2025-2029 selain dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, juga perlu mendapatkan dukungan dari sektor non pemerintah. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan untuk penyusunan dokumen RAD-PG;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka social control terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAD- PG.

IV.4 Pembiayaan

Pelaksanaan aksi dalam RAD Pangan dan Gizi Kota Tegal disusun berdasarkan nomenklatur sub kegiatan yang ada dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Matrik Rencana Aksi disajikan dalam lampiran.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

V.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama output maupun outcome dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat.

Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah:

1. Menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. Menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. Menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. Melakukan pemantauan;
5. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. Evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
7. Menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. Menyiapkan laporan hasil evaluasi.

Monitoring pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup pemerintah daerah dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Tegal dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan harapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Dalam Permen-PPN No. 1 Tahun 2018, Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan.

Terkait dengan hal tersebut, maka secara garis besar, tujuan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah mengamati perkembangan kinerja pembangunan pangan dan gizi di Kota dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian kinerja indikator RAD Pangan dan Gizi, serta menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi di Kota Tegal.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, pelaksanaan pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang baik.

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan RAD-PG Kabupaten/kota

a. Substansi yang dipantau

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- 1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
- 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B tercantum dalam Lampiran. Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan.

b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/kota atau Perangkat Daerah lain yang ditetapkan kepala daerah.

c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/kota.

d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi.

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- 3) Pelaksana: Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama Perangkat Daerah dan peserta dari kecamatan yang terlibat

di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;

- 4) Hasil *Workshop*: Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.

b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)

- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
- 2) Pelaksana: Pelaksana kunjungan lapangan adalah Perangkat Daerah kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
- 3) Hasil kunjungan lapangan: Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti. Untuk pemantauan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG dapat dilakukan dengan metode skoring (skala 1-4) pada indikator kemajuan sebagai berikut. Format lebih lengkap dapat dilihat pada Form Evaluasi B.

1. Memperkuat Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan

Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PG dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu Perangkat Daerah yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Penanda kemajuan proses ini adalah:

1.1 Mengembangkan Mekanisme Koordinasi Di Daerah Masing-masing

Penanda kemajuan ini melihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan atau mekanisme pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan RAD-PG.

1.2 Berkoordinasi Secara Internal dan Memperluas Mitra Yang Dilibatkan

Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam forum teknis RAD-PG serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi.

1.3 Berkontribusi pada Forum Teknis RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG mendorong kolaborasi internal, pada isu-isu yang paling relevan dengan ketahanan pangan dan gizi di daerah.

1.4 Pelaporan dan Refleksi Kontribusi Serta Capaian yang Diraih

Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG melakukan pelacakan keuangan dan melaporkan implementasi tindakan yang disepakati, oleh masing-masing pemangku kepentingan. Kemampuan forum untuk mendorong akuntabilitas juga dipertimbangkan.

1.5 Mempertahankan Dampak Politik dari Forum Teknis RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pendekatan multi-sektoral untuk ketahanan pangan dan gizi diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yang ada sifatnya berkelanjutan.

2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung

Keberadaan kebijakan yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

2.1 Analisis Berkelanjutan Terhadap Peraturan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait pangan dan gizi (spesifik dan sensitif) yang ada, dianalisis menggunakan proses konsultatif multisektoral.

2.2 Advokasi yang berkelanjutan Untuk Pengembangan, Pemutakhiran dan Penyebaran Kebijakan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan pangan dan gizi dan diseminasinya (strategi advokasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung diseminasi kebijakan yang relevan).

2.3 Mengembangkan dan/atau Memperbarui Kebijakan Melalui Upaya Yang Terkoordinasi

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah mengoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.

2.4 Melaksanakan Kebijakan dan Peraturan

Penanda kemajuan ini melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan, seperti peraturan mengenai ASI eksklusif dan cuti orang tua, fortifikasi pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, dan lainnya.

2.5 Memantau dan Melaporkan Pembelajaran dan Dampak Kebijakan

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan pangan dan gizi yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum teknis RAD-PG.

3. Menyelaraskan Kegiatan

Penyelarasan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauh mana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

3.1 Sinkronisasi Program/Kegiatan Sesuai Target Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan di daerah menyelaraskan rencana dan program mereka sendiri di bidang pangan gizi sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang secara signifikan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi.

3.2 Menerjemahkan Kerangka Kebijakan dan Hukum Ke Dalam Matriks Aksi RAD- PG

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan di daerah menyetujui RAD-PG sebagai instrumen untuk menyelaraskan intervensi di bidang pangan dan gizi dengan target pangan dan gizi yang teridentifikasi dengan jelas.

3.3 Mengatur dan Melaksanakan Prioritas Tahunan yang Terdapat dalam RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat kegiatan prioritas dalam RAD-PG terlaksana di daerah.

3.4 Bersama-sama Memantau Kegiatan Prioritas Sesuai Dengan RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk ketahanan pangan dan gizi.

3.5 Mengevaluasi Implementasi Kegiatan RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti bidang pangan dan gizi yang lebih baik.

4. Pelacakan Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Menilai kelayakan finansial RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Penanda kemajuan proses ini adalah:

4.1 Mengkaji Sumber Pendanaan dan Kemungkinan Pendanaan Lain untuk Kegiatan RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan RAD-PG lintas sektor. Data keuangan dibagikan secara transparan dengan mitra percepatan perbaikan gizi.

4.2 Memantau dan Melaporkan Pendanaan

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak pengalokasian dan pengeluaran keuangan mereka (jika tersedia) di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi mekanisme/inisiatif pembiayaan baru. Forum teknis RAD-PG harus dapat melaporkan data keuangan secara transparan.

4.3 Menyelaraskan Sumber Daya Termasuk Mengatasi Kekurangan Pendanaan Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat apakah pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, (termasuk dari mekanisme/inisiatif pembiayaan baru), melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan RAD-PG.

4.4 Distribusi Pendanaan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mengubah alokasi pendanaan (seperti yang dijelaskan dalam penanda kemajuan 4.3) menjadi pencairan yang sebenarnya.

4.5 Melakukan Kajian dan Penganggaran Pendanaan Tahunan Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka Panjang untuk dampak yang lebih baik. Ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan mengatasi kesenjangan pendanaan.

5. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting

Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD-PG dalam pelaksanaan aksi penurunan stunting di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RAD-PG.

5.1 Analisis Situasi

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memaksimalkan penggunaan analisis situasi seperti: analisis sebaran analisis sebaran masalah stunting; analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; analisis penyampaian layanan pada sasaran; analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar lokasi.

5.2 Penyusunan Rencana Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memanfaatkan RAD-PG dalam menyusun rencana program dan kegiatan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil analisis situasi program pencegahan dan penurunan

5.3 Rembuk Stunting

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu menjadi memanfaatkan RAD-PG instrumen advokasi sekaligus sosialisasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam rembuk stunting.

5.4 Sistem dan Manajemen Data Stunting

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi

RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memanfaatkan RAD-PG untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; menilai sistem manajemen data saat ini; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan sistem data; melakukan review terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.

5.5 Review Kinerja Tahunan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu mengelaborasi data hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan review kinerja tahunan; mengidentifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan, serta menyusun dokumen hasil review kinerja tahunan.

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Evaluasi dampak dapat dilakukan pemerintah daerah dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan evaluasi oleh pemerintah pusat. Apabila pemerintah daerah melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah.

V.2 Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/Wali Kota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

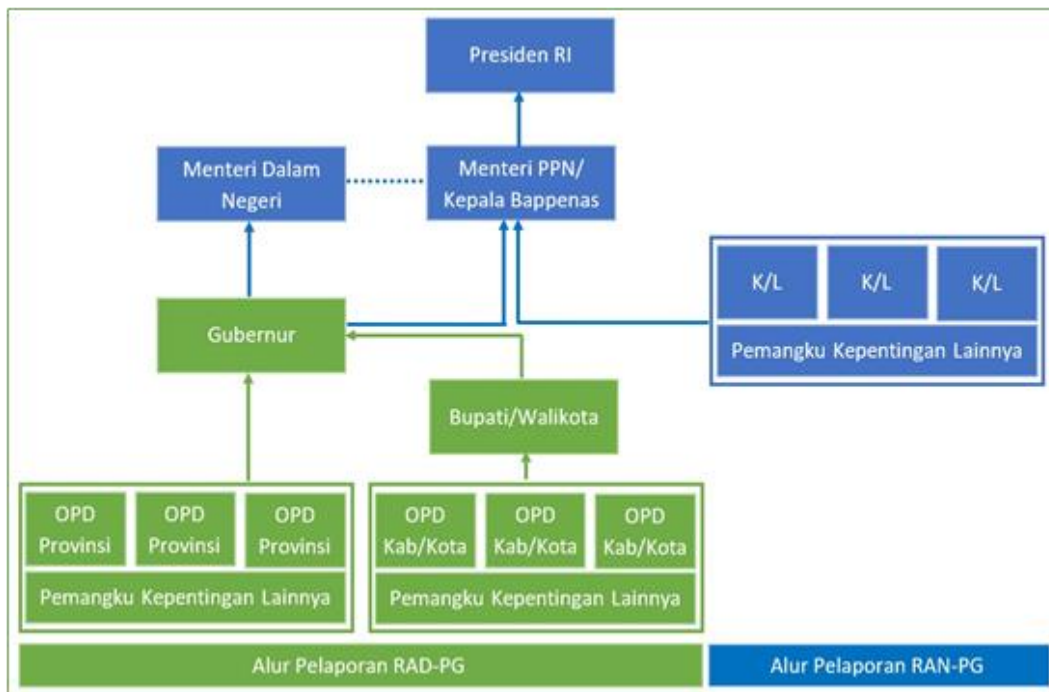
1. Tujuan Pelaporan

- a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 5. 1 Alur Pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi



Berdasarkan Gambar 5.1, pelaporan RAD-PG meliputi pelaporan ke tingkat provinsi dimana Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur paling lambat 28 Februari tahun berikutnya. Sementara pelaporan ke tingkat pusat dimana Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 31 April tahun berikutnya.

3. Isi Laporan

A. Pendahuluan

- 1) Latar Belakang
- 2) Tujuan

B. Pelaksanaan RAD-PG

- 1) Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
- 2) Gambaran Umum Program/Kegiatan/Aksi dan Pendanaan
- 3) Pendokumentasian Praktik Baik
- 4) Tantangan yang Dihadapi
- 5) Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan

C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan

- 1) Rekomendasi
- 2) Rencana Tahun Depan

D. Lampiran

- 1) Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
- 2) Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B

- 3) Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode)

Tabel 5. 1Form Pemantauan A: Indikator Kinerja/Kelurahan RAD-PG Tahun...

[illegible]

Tabel 5. 2 Form Pemantauan B. proses Pelaksanaan Rad-PG

Indikator Proses	Skor* Tahun	Tantangan	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Melibatkan Pemangku Kepentingan Untuk Beraksi Bersama			
2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Koheren			
3. Memastikan Kegiatan Terlaksana Untuk Mencapai Hasil yang Telah Disetujui Bersama			
4. Memantau Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya			
5. Indikator Tambahan Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota - Pemanfaatan RAD-PG dalam Pelaksanaan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan <i>Stunting</i>			

0	Belum dilakukan	Tidak dilakukan saat ini
1	Dilakukan	Prosesnya kurang berjalan dengan baik
2	Dilakukan	Prosesnya berjalan cukup baik
3	Dilakukan	Prosesnya berjalan sangat baik

Tabel 5. 3 Form Pemantauan dan evaluasi C: Umpan Balik Pemanataun dan Evaluasi PG Tahun....

Strategi	Hasil Analisa	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)
TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		

Tabel 5. 4 Form Pemanatauan D: Formulir Kunjungan Lapangan

[illegible]

CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI:

- 1 FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA UTAMA/KELUARAN RAD-PG TAHUN BERJALAN
 - a. Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi
 - b. Kolom 2 diisi dengan aksi penjabaran strategi untuk pencapaian tujuan RPJMD/RPJMN
 - c. Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan aksi
 - d. Kolom 4 diisi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.
 - e. Kolom 5 diisi dengan besar capaian *output* yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan. f. Kolom 6 diisi dengan realisasi *output* sesuai dengan tahun pelaporan.
 - f. Kolom 7 diisi dengan besar anggaran definitif yang dialokasikan untuk aksi.
 - g. Kolom 8 diisi dengan besar anggaran yang diserap untuk aksi.
 - h. Kolom 9 diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk aksi
 - i. Kolom 10 diisi dengan YA jika merupakan kegiatan konvergensi penurunan *stunting*, dan TIDAK jika bukan
 - j. merupakan kegiatan penurunan *stunting*.
- 2 FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI B: PROSES PELAKSANAAN RAD-PG UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DAERAH
 - a. Kolom 1 diisi dengan indikator proses yang akan dievaluasi
 - b. Kolom 2 diisi dengan skor penanda kemajuan tahun berjalan yang dinilai. Pemberian nilai sesuai dengan skala penilaian angka 0 (terendah) hingga 3 (tertinggi).
 - c. Kolom 3 diisi dengan deskripsi masalah atau tantangan yang ditemui pada masing-masing penanda kemajuan.
 - d. Kolom 4 diisi dengan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi tantangan dan pencapaian skor proses yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya.
- 3 FORM PEMANTAUAN C: UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG
 - a. Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi
 - b. Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi A dan B. Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke Perangkat Daerah mana rekomendasi (kolom 3) akan ditujukan.
 - c. Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.
- 4 FORM PEMANTAUAN D: FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN
 - a. Kolom 1 diisi dengan nomor yang berurut untuk mendeskripsikan banyaknya Perangkat Daerah beserta kegiatan yang telah dilaksanakan.

- b. Kolom 2 diisi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan seperti yang tercantum pada RAD-PG
- c. Kolom 3 diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PG.
- d. Kolom 4 diisi dengan akumulasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- e. Kolom 5 diisi dengan dua kategori saja: TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 terlaksana), dan TIDAK TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 tidak terlaksana).
- f. Kolom 6 diisi dengan tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3
- g. Kolom 7 diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2, 3, 4, dan 6.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Darah Pangan dan Gizi Kota Tegal Tahun 2025-2029 ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal untuk menyelaraskan pembangunan di bidang pangan dan gizi dengan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari sasaran pembangunan pangan dan gizi Kota Tegal yang telah diselaraskan dengan sasaran pembangunan pangan dan gizi nasional yang termuat dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024.

Dokumen RAD pangan dan gizi ini memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan bidang pangan dan gizi di Kota Tegal, dan juga strategi serta aksi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pangan dan gizi di kurun waktu 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam penyusunan RAD pangan dan gizi ini, dilakukan pula penyelarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 dan juga dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang terkait.

Dalam implementasi Rencana Aksi Darah Pangan dan Gizi Kota Tegal Tahun 2025-2029 ini, membutuhkan dukungan dan pembentukan kelembagaan yang optimal sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Dukungan kelembagaan ini bertujuan untuk menguatkan dan memastikan upaya pembangunan bidang pangan dan gizi terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Dokumen Rencana Aksi Darah Pangan dan Gizi ini perlu dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Tegal periode tahun 2025-2029. Hal tersebut bertujuan agar rancangan-rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam dokumen Rencana Aksi Darah Pangan dan Gizi dapat terintegrasi ke dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu dalam setiap tahun pelaksanaannya, dokumen RAD Pangan dan Gizi ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apa yang telah menjadi target, dan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan bidang pangan dan gizi benar-benar dilaksanakan oleh seluruh lembaga terkait. Monitoring dan evaluasi ini dapat melibatkan pihak-pihak

eksternal dengan mempedomani pada petunjuk monitoring dan evaluasi yang ada.

Dukungan dari seluruh pihak baik organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi dan juga lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Tegal sangat diharapkan dalam pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ini.

Lampiran Rencana Aksi

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator, Target sampai tahun 2029, Total Kebutuhan Anggaran

DKPPP (Dinas Kelautan dan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan)

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Peningkatan Ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Peningkatan produksi pangan yang beragam;	- Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan - Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan) - Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan	9.960.000	1 Laporan	10.457.000	1 Laporan	10.980.000	1 Laporan	11.530.000	1 Laporan	12.150.000	DPPKBP 2A, PKK	Kota Tegal
		Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok & Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi & pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	1 Laporan	1 laporan	17.470.000	1 laporan	18.221.000	1 laporan	19.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	21.000.000	Polres, Bapperida, Bulog, Dinkop	Kota Tegal

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	16.204.000	1 laporan	16.824.000	1 laporan	17.500.000	1 Laporan	18.150.000	1 Laporan	19.000.000	Pelaku usaha UMKM, Dinkop	Tergantung Program Pusat/Provinsi
		Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	- Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan - Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 laporan	1 laporan	15.000.000	1 laporan	16.000.000	1 laporan	17.100.000	1 Laporan	18.250.000	1 Laporan	19.500.000	Dinkop, Pelaku Usaha	Kota Tegal
		Pengayaan nilai	Meningkatkan ketersediaan	Pengadaan Cadangan	Jumlah Cadangan	Ton	24,83	242.880.00	100	251.92	100	290.00	100	310.80	100	330.00	Poktan, Bulog,	Kota

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEHOLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota	Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pangan		Ton	0	%	0.000	%	0.000	%	0.000	%	0.000	Dinsos, Bapperida	Tegal
2.	Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	14.290.000	1 Dokumen	14.719.000	1 Dokumen	15.160.000	1 Dokumen	15.620.000	1 Dokumen	16.100.000	PKK	Tergantung Program Pusat/Provinsi
		Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan	- Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga - Meningkatkan kegiatan advokasi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencapaian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan	3.960.000	1 Laporan	4.356.000	1 Laporan	4.800.000	1 Laporan	5.300.000	1 Laporan	5.800.000	KWT, Poktan, Kelurahan LPK/LKP	Kota Tegal

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN												STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							2025		2026		2027		2028		2029					
							TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.				
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	penganekaragaman konsumsi pangan - Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan) - Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota																	
		Pengembangan sistem jaringan pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Koordinasi dan Sinkronasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumen Perkapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumen Perkapita per tahun	1 Laporan	1 Laporan	27.268.000	1 Laporan	28.995.000	1 Laporan	30.850.000	1 Laporan	33.000.000	1 Laporan	35.000.000	Poktan, KWT Pokhlaksar, Pelaku Usaha	Kota Tegal		
		Penyediaan dan penyalur	Memaksimalkan pemanfaatan peta	Penyusunan, Pemutakhiran dan	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran	1 Dokumen	2 Dokumen	12.870.000	1 Dokumen	12.955.000	1 Dokumen	13.050.000	1 Dokumen	13.200.000	1 Dokumen	13.500.000	Kelurahan, Kecamatan	DKPPP		

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN												STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							2025		2026		2027		2028		2029					
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.				
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		an pangan untuk situasi darurat;	rawan pangan	Analisis Peta Ketahanan dan Kerencanaan Pangan	dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerencanaan Pangan		n		n		n		n		n		an, BPS, Dinkes, Dinsos, Disdukc apil, Bapperid a			
		Penumb uhan kemandi rian pangan untuk masyara kat di daerah rentan pangan dan terdamp ak bencana;	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/K ota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kot a	1	1 Lapo ran	5.365.000	1 Lapo ran	5.465.000	1 Lap oran	5.600.000	1 Lapo ran	5.700.000	1 Lapo ran	5.800.000	Kelurah an, Kecamat an, BPS, Dinkes, Dinsos, Disdukc apil, Bapperid a, TPID, Satgas Pangan	DKPPP		
		Pengemb angsan sistem logistik	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu pangan Segar asal	1 Dokumen	1 Dok ume n	33.776.000	1 Dok ume n	36.154.500	1 Dok ume n	38.700.000	1 Dok ume n	41.500.000	1 Dok ume n	44.500.000	Dinkop, Pelaku Usaha, Retail	Pasar-Pasar Trasdisi onal dan		

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEHOLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		pangan	untuk keamanan pangan asal tumbuhan	pangan Segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													Modern
4.	Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	4.550.000	1	4.600.000	1	4.830.000	1	5.071.500	1	5.325.000	Petani, Penyewaan alat pertanian	Kota Tegal

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;																
		Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (Laporan)	1	3	4.600.000	3	4.853.000	3	5.095.000	3	5.350.500	3	5.618.025	Petani, Dinas pertanian provinsi / kementerian	Kota Tegal

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN												STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							2025		2026		2027		2028		2029					
							TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.				
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;																		
		Pengendalian pemborosan pangan (food waste);	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	3.123.965	1	3.250.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	Peternak , petani, Lab PHP Wil Pekalongan	Kota Tegal		

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			(SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya															
		Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan pakan/pakan/pakan/tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan Mutu Benih/bibit pakan/pakan/pakan/tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	3	13.000.000	3	13.600.000	3	14280000	3	14.994.000	3	15.743.000	Peternak , Distributor pakan, petshop, Dinkop	Kota Tegal
		Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi food loss	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana yang dibangun dan direhabilitasi dan dipelihara	1	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.600.000	1 Unit	7.260.000	1 Unit	7.986.000	Petani, Dinas Pertanian provinsi	Kota Tegal
5.	Penguatan	Penguat	Penguatan	Pemberantas	Jumlah wilayah	1	1	21.02	1	21.546.	1	22.624.	1	24.886.	1	26.130.	Peternak	Kota

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN													
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEHOLDERS YANG MELIBATKAN	LOKASI		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.				
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	an koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	an Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan (Laporan)			5.800		600		000		000		000		000	, Dinkes Lab BPVet (Prov/Jogja), DLH, Masyarakat	Tegal
		Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Penyediaan pelayanan Jasa Medik Veteriner	Veteriner Terfasilitasi	1	1	21970000	1	24101000	1	26.551.100	1	29.162.200	1	32.078.500	Peternak, komunitas pecinta hewan, Dinkes, Masyarakat	Kota Tegal		

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEHOLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah															kat	
		Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	1	18.107.924	1	18.566.680	1	19.494.000	1	20.269.000	1	21.282.500	Peternak, Distributor/ pedagang, Dinkop, Mall, RM, Masyarakat	Kota Tegal
		Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan	- Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes) - Menyediakan akses/bantuan informasi,	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan pertanian di Kecamatan	Jumlah Kelembagaan yang ditingkatkan kapasitasnya di Kecamatan dan	1	4 Unit	224.500.000	4 Unit	229.000.000	8 Unit	240.450.000	8 Unit	252.472.500	8 Unit	264.886.000	Petani, Balai diklat penyuluh pertanian	Kota Tegal

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEHOLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dan gizi	komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	dan Desa	Desa												n	
		Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.082.451	5.076.051	1 Unit	7.500.000	1 Unit	11.250.000	1 Unit	16.875.000	Petani, Balai diklat penyuluhan pertanian	Kota Tegal
		Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	1 Unit	1 Unit	1.650.000.000	1 Unit	1.815.000.000	1 Unit	19.965.000.000	1 Unit	2.196.150.000	1 Unit	2.415.765.000	Nelayan	Kota Tegal
		Peningkatan produksi pangan yang beragam	- Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam - Menyediakan	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	12 Orang	22 Orang	1.272.021.000	22 Orang	1.399.223.000	22 Orang	1.539.145.000	20 Orang	1.693.059.000	20 Orang	1.862.365.000	Nelayan	Kota Tegal

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait															
		Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	3 layanan	3 layanan	2.614.958.535	3 layanan	2.876.454.389	3 layanan	3.164.099.827	3 layanan	3.480.509.809	3 layanan	3.828.560.789	Nelayan	Kota Tegal
		Peningkatan produksi pangan yang beragam	- Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam - Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan.	5 Kelompok	5 Kelompok	162.152.980	5 Kelompok	178.368.278	5 Kelompok	196.205.000	5 Kelompok	215.825.000	5 Kelompok	237.407.000	Nelayan	Kota Tegal

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pelatihan														
		Peningkatan produksi pangan yang beragam	- Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam - Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya ikan di darat	Jumlah pembudidaya ikan di darat yang memperoleh pembinaan dan pemantauan	20 Orang	20 Orang	16.314.375	20 Orang	17.945.813	20 Orang	19.740.000	20 Orang	21.714.000	20 Orang	23.885.000	Pembudidaya Ikan	Kota Tegal
		Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	16.462.500	15 Pelaku Usaha	86.808.000	15 Pelaku Usaha	95.448.800	15 Pelaku Usaha	105.037.680	15 Pelaku Usaha	155.541.448	Pembudidaya Ikan	Kota Tegal
		Meningkatkan kerjasama dengan	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai	jumlah Unit Usaha pengolahan dan Pemasaran	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	1.800.000	20 Unit Usaha	17.945.813	20 Unit Usaha	34.260.188	20 Unit Usaha	37.686.207	20 Unit Usaha	41.454.827	Pembudidaya Ikan	Kota Tegal

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEHOLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	kewenangan kabupaten/kota	hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko													
		Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan	kelakuan penguatan kampanye gemarikan	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	Jumlah peningkatan ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.107 Ton	8.309 Ton	82.778.850	8.309,68 Ton	91.056.735	8310 Ton	100.162.000	8310,5 Ton	110.178.000	8311 Ton	121.196.000	Pengolahan Ikan	Kota Tegal
		Peningkatan	- Kelakuan penguatan	Pemberian Fasilitas bagi	Jumlah peningkatan	20 Pelaku	20 Pela	275.000.00	20 Pela	302.50	20 Pela	332.75	20 Pela	336.02	20 Pela	372.62	Pengolahan dan	Kota

No	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2023)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		STAKEH OLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		produksi pangan yang beragam	kampanye gemarikan - Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Pelaku Usaha Perikanan skala mikro dan kecil	ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Usaha	ku Usa ha	0	ku Usa ha	0.000	ku Usa ha	0.000	ku Usa ha	5.000	ku Usa ha	7.000	Pemasar hasil perikanan	Tegal

Dinas Kesehatan

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARG ET	RP.		
1.	Peningkat an pemanfaat an pangan dan pelayanan gizi	Peningka tan frekuensi kegiatan sosialisas i dan edukasi keamana	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi	Persentase IRTP dibina dan diawasi	100%	297.9 95	100%	327.7 94	100%	350. 000	100%	350.0 00	100 %	350. 000	DPMPTSP, Disnakerin	Kota Tegal

[illegible]

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARG ET	RP.		
		n Air Susu															
		Ibu (ASI) eksklusif serta penyedia an dan pemanfaa tan Makanan Pendamp ing Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM)	Presentase TPM dibina dan diawasi	100%	14.931	100%	16.424	100%	20.000	100%	20.000	100 %	20.000	DPMPTS, Disnakerin	Kota Tegal
		Peningka tan layanan kesehata n dan gizi masyarakat; Peningka tan jaminan keamana n dan mutu	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra	1	5.500	1	6.050	1	15.000	1	15.000	1	15.000	Disnakerin	Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARG ET	RP.		
		Pangan.		Jajanan	Makanan Jajanan												
2.	Penguata n kelembag aan dan tata kelola pangan dan gizi.	Penguata n kelembag aan ketahana n pangan dan gizi tingkat nasional, provinsi, kabupate n/kota, dan desa/kel urahan;	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga diperiksa	100 %	279.3 98	100 %	307.3 37	100%	320. 000	100%	330.0 00	100 %	335. 000	Disnakerin, Satpol PP, Kejaksaan, kepolisian, BPOM	Kota Tegal

Dinas Sosial

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1.	Peningkatan keterjangkauan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pengembangan sistem jaringan pangan sosial dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Penyediaan permaknaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	850 orang	4.175.000	850 orang	4.225.000	850 orang	4.647.500	850 orang	5.112.250	850 orang	5.623.475	Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahteraan) di Kelurahan	Kota Tegal
		Penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	60.000	350 orang	75.000	350 Orang	82.500	350 Orang	90.750	350 Orang	99.825	Tim SAR BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Kota Tegal

DPPKBP2P (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
1.	Penguat an kelemba gaan dan tata kelola pangan dan gizi	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Kegiatan Pelaksanaa n Pembangunan Keluarga Melalui Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keluarga dan kesejahteraan keluarga	100 %	2.525.638.100	100 %	2.651.918.100	100 %	2.917.109.910	100 %	3.208.820.901	100 %	3.529.702.991	Penyuluh KB	Kota Tegal
2.	Penguat an kelemba gaan dan tata kelola pangan dan gizi	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Sub kegiatan kelompok dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Lapo ran	79.083.000	1 Lapo ran	83.037.000	1 Lapo ran	91.340.700	1 Lapo ran	100.474.770	1 Lapo ran	110.522.247	Penyuluh KB	Kota Tegal
3.	Peningka tan pemanfa atan pangan dan pelayana n gizi (esensial	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus	Mengembangk an peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	135 Kelo mpo k	1.550.355.000	135 Kelo mpo k	1.659.372.000	135 Kelo mpo k	1.825.309.200	135 Kelo mpo k	2.007.840.120	135 Kelo mpo k	2.208.624.132	Penyuluh KB	Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	)	hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;	hewani		PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)												
		Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis	Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	575 Orang	494.133.000	575 Orang	518.839.000	575 Orang	570.722.900	575 Orang	627.795.190	575 Orang	690.574.709	Penyuluh KB	Kota Tegal
		Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada	Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian	20 Unit	372.067.000	20 Unit	390.670.000	20 Unit	429.737.000	20 Unit	472.710.700	20 Unit	519.981.770	Penyuluh KB	Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
		sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	hewani	dan Kemandiria n Organisasi Kemasyara katan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	Organisasi Kemasyarakat an (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)												
		Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	Mengembangk an peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani	Sub Kegiatan Peningkata n Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyara katan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga (BKB, BKR, BKL,	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakat an dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	15 Ora ng	80.047.0 00	15 Ora ng	80.047.0 00	15 Ora ng	88.051.7 00	15 Ora ng	96.856.8 70	15 Ora ng	106.542. 557	Penyuluh KB	Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
				PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)												
		Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Desa Berkembang yang Aktif	100 %	2.054.860.885	100 %	2.253.636.962	100 %	2.479.000.658	100 %	2.726.900.724	100 %	2.999.590.796	Penyuluh KB	Kota Tegal

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLDER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1.	Peningkatan keterjangkauan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan.	Menambahk an informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Lap oran	14.999.950	12 Lap oran	25.000.000	12 Lap oran	30.000.000	12 Lap oran	40.000.000	12 Lap oran	50.000.000	Kementerian Perdagangan RI, Dinas Perdagangan Prov. Jateng, Bulog, Distributor, Pedagang Pasar, Pusat Perbelanjaan , Surat Kabar	Kota Tegal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKE HOLDE R YANG DILIBA TKAN	LOKA SI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
1.	Peningkatan Ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Peningkatan produksi pangan yang beragam;	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Operasi dan Pemeliharaan kanal Banjir	Presentase sarana dan prasarana pengendali banjir yang berfungsi dengan baik	65	6.000.000	70	6.000.000	75	6.000.000	80	6.000.005	85	6.000.001	PSDA Wilayah Pemali Comal	Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKE HOLDE R YANG DILIBA TKAN	LOKA SI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
2	Penguatan Kelembagaan dan Tata kelola Pangan dan Gizi	Penguatan koordinasi dalam perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang di Optimalisasi	83.89	1.770.000	84,04	1.650.000	84,63	4.650.000	85,22	4.650.000	85,81	4.650.000	Kecamatan , Kelurahan dan KSM di 13 Kelurahan	13 Kelurahan
		Penguatan koordinasi dalam perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD- PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	56.749	1.770.000	56.849	1.650.000	57.249	4.650.000	57.649	4.650.000	58.049	4.650.000	Kecamatan , Kelurahan dan KSM di 13 Kelurahan serta masyarakat	13 Kelurahan
		Penguatan koordinasi dalam perencanaan , pelaksanaan, pemantauan	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang di operasikan dan di pelihara	62.54	2.050.000	62.69	2.050.000	62,84	2.050.000	62,99	2.050.000	63,14	2.050.000	PDAM, Kecamatan , Kelurahan dan KSM	Kelurahan Kejam bon dan Kelurahan

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKE HOLDE R YANG DILIBA TKAN	LOKA SI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
		dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting													Debo ng Kulon	
		Penguatan koordinasi dalam perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD- PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	42.309	2.050.000	42.409	2.050.000	42509	2.050.000	42609	2.050.000	42709	2.050.000	PDAM, Kecam atan , Kelura han dan KSM	Kelur ahan Kejam bon dan Kelur ahan Debo ng Kulon

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
1.	Peningkatan Ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10	22.877.000	12	27.453.000	12	27.453.000	12	27.453.000	12	27.453.000	Perusahan	Kota Tegal
		Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	94.533.600	3	95,000,000	3	95,000,000	3	95,000,000	3	95,000,000	Pelaku Industri	Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
		Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen laporan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standa r kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pener-bitan perizinan berusaha melalui (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha IKM selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	32,156,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	Pelaku Industri	Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
		Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Fasilitasi pengumpulana n, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	1	32,156,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	Pelaku Industri	Kota Tegal

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOL DER YANG DILIBATKA N	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
1.	Peningkatan keterjangkau an pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Penyediaaaa n dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Pengendalian Operasi dan Pemeliharaaa n Sarana Prasarana Kesiapsiagaa n Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 Lapo ran	240.650	4 Lapo ran	240.650	4 Lapo ran	264.715	4 Lapo ran	291.186	4 Lapo ran	320.305	Dinsos, Dinkes, Satpol PP, DPUPR, Kepolisian , TNI, Basarnas, Relawan	Kota Tegal
		Penyediaaaa n dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Penyediaan Logistik Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Ora ng	102.754	20 Ora ng	102.754	520 Ora ng	113.029	520 Ora ng	124.332	520 Ora ng	136.765	Dinsos, Dinkes, Satpol PP, DPUPR, Kepolisian , TNI, Basarnas, Relawan	Kota Tegal
		Penumbuh an kemandiria n Pangan	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3	Pencarian pertolongan dan evakuasi korban	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	4 oran g	18.000	4 oran g	18.000	4 oran g	19.800	4 oran g	21.780	4 oran g	23.958	Dinsos, Dinkes, Satpol PP, DPUPR,	Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOL DER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.	TAR GET	RP.		
		untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi		Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Kabupaten/Kota											Kepolisian , TNI, Basarnas, Relawan	
		Penumbuh an kemandiria n Pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan dalam aspek manajerial dan teknis.	50 Ora ng	59.022	50 Oran g	59.022	50 Oran g	64.924	50 Oran g	71.416	50 Oran g	78.558	Basarnas, Relawan	Kota Tegal

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TARG ET	RP.	TARG ET	RP.	TARG ET	RP.	TARG ET	RP.	TARG ET	RP.		
1.	Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Doku men	90.000. 000	2 Doku men	99.000. 000	2 Doku men	108.90 0.000	2 Doku men	119.79 0.000	2 Doku men	131.76 9.000	Perangkat Daerah terkait Pangan Gizi	Kota Tegal
			Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembanguna n Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Lapo ran	175.00 0.000	7 Lapo ran	192.50 0.000	7 Lapo ran	211.75 0.000	7 Lapo ran	232.92 5.000	7 Lapo ran	256.21 7.500	Perangkat Daerah tagging stunting	Kota Tegal

NO	Tujuan Startegis	Strategi	Aksi	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										STAKEHOLD ER YANG DILIBATKAN	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029			
						TARG ET	RP.	TARG ET	RP.	TARG ET	RP.	TARG ET	RP.	TARG ET	RP.		
2.	Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Sub Kegiatan Penelitian, pengembangan dan perekayasaa n di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Doku men	313.08 8.254	1 Doku men	333.49 0.794	1 Doku men	340.00 0.000	1 Doku men	342.00 0.000	1 Doku men	343.00 0.000	Perangkat Daerah terkait Pangan Gizi	Kota Tegal

Pj. WALI KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19700705 199003 1 003